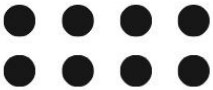


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Triwulan I Tahun 2026



*Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan
Penyuluhan Perikanan*



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tim

Penyusun

Kepala BRPPUPP

Kepala Subbagian Umum / Ketua Tim Kerja Manajerial

Kepala Tim Kerja Penyuluhan

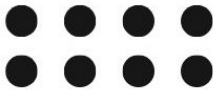
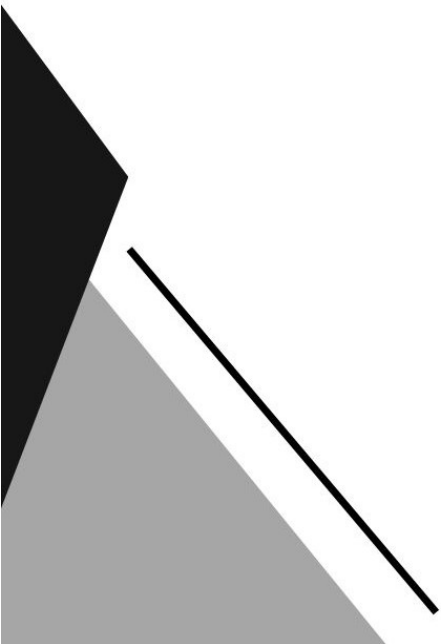
Acim Tirtana, SE

Lisnawati, SE

Rian Ariadi Harahap, S.AP

Arismansyah, S.Pi

Sevi Sawestri, S.Si., M.Si



Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan
Penyuluhan Perikanan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BRPPUPP Triwulan I Tahun 2026. LKjIP BRPPUPP Triwulan I Tahun 2026 disusun dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN – RB) Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban BRPPUPP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan terselenggaranya good governance. Laporan Akuntabilitas Kinerja BRPPUPP Triwulan I Tahun 2026 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai, baik makro maupun mikro serta langkah-langkah pelaksanaan kebijakan kegiatan manajerial dan penyuluhan kelautan dan perikanan. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil-hasil penelitian dan pengembangan iptek kelautan dan perikanan.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Palembang, 21 April 2026
Kepala Balai Riset Perikanan Perairan
Umum dan Penyuluhan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rezki Antoni S, S.Kel

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Tugas dan Fungsi.....	3
1.4 Keragaan SDM BRPPUPP.....	5
1.5 Sistematika Laporan Kerja.....	6
1.6 Potensi dan Permasalahan.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 Rencana Strategis.....	10
2.2 Rencana Kerja Tahunan.....	18
2.3 Perjanjian Kinerja.....	18
2.4 Pengukuran Kinerja.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
3.1 Prestasi Indikator Kinerja Tahun 2025.....	23
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	23
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	44
3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumberdaya BRPPUPP Tahun 2025.....	48
BAB IV PENUTUP.....	50
4.1 Capaian Kinerja Utama.....	51
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi.....	53
LAMPIRAN.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rancangan Indikator dan Target Kinerja BRPPUPP Tahun 2025-2029.....	12
Tabel 2. Rencana Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2026.....	18
Tabel 3. Perjanjian Kinerja antara Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan dengan Pusat Penyuluhan KP Tahun 2026.....	19
Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026.....	24
Tabel 5. Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok).....	25
Tabel 6. Perbandingan Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok) Pendukung.....	26
Tabel 7. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPPUPP (Kelompok).....	27
Tabel 8. Perbandingan Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPPUPP (Kelompok) TW I Tahun 2026 dengan Satminkal Lain.....	29
Tabel 9. Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok).....	30
Tabel 10. Perbandingan Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok).....	31
Tabel 11. Capaian IKU Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPPUPP (Unit).....	31
Tabel 12. Perbandingan Capaian IKU Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPPUPP (Unit).....	33
Tabel 13. Capaian IKU Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BRPPUPP (Paket).....	34
Tabel 14. Capaian IKU Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan di BRPPUPP (Model).....	34
Tabel 15. Capaian IKU Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPPUPP (Orang).....	35
Tabel 16. Capaian IKU Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPPUPP (%).....	35
Tabel 17. Perbandingan Capaian Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan dengan Satminkal Lain.....	36
Tabel 18. Capaian IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai).....	37
Tabel 19. Capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP (Nilai).....	38
Tabel 20. Capaian IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di BRPPUPP (Nilai).....	39
Tabel 21. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN di BRPPUPP (indeks).....	40
Tabel 22. Capaian IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPPUPP (Nilai).....	41
Tabel 23. Capaian IKU Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%).....	42
Tabel 24. Perbandingan Capaian Persentase rencana umum pengadaan PBJ.....	43

Tabel 25. Realisasi Anggaran BRPPUPP Triwulan I Tahun 2026.....	44
Tabel 26. Realisasi Anggaran dan Efisiensi Per IKU.....	45

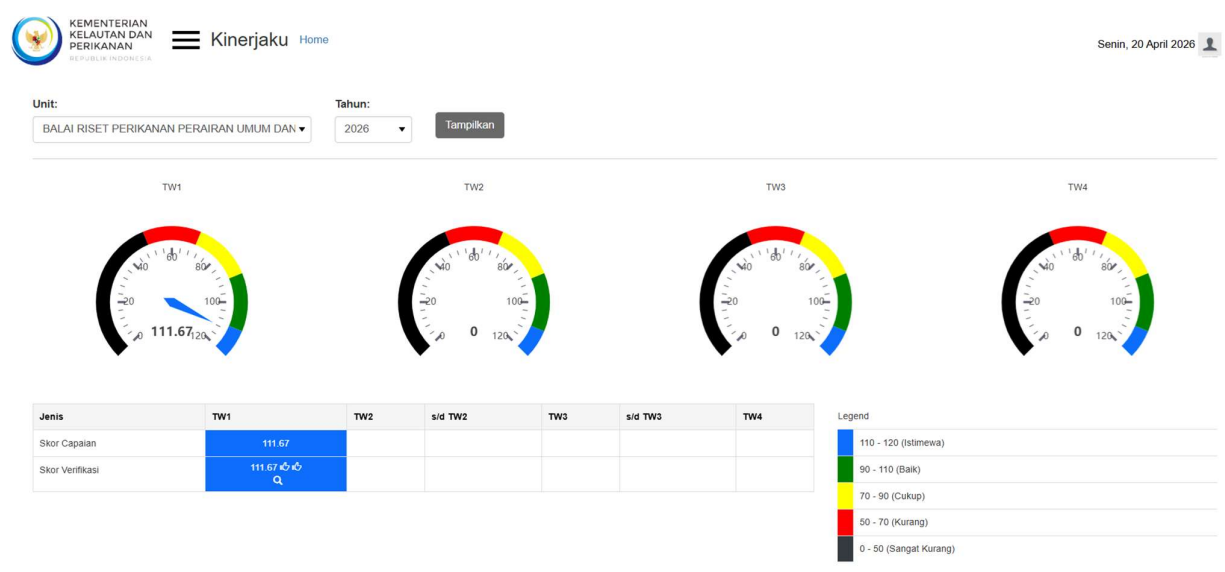
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BRPPUPP.....	4
Gambar 2. Grafik Komponen Pegawai BRPPUPP Tahun 2026.....	5
Gambar 3. Status Indeks capaian IKU.....	20
Gambar 4. Dashboard Kinerja Triwulan I Tahun 2026 BRPPUPP.....	51

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BPPSDM KP 2020-2024, Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan pokok ke-1 yaitu merumuskan perencanaan pembangunan KP nasional melalui penyediaan hasil riset inovatif dan SDM kompeten.

Pengukuran capaian kinerja BRPPUPP Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan sistem aplikasi Kinerjaku dari Kementerian Kelautan Perikanan yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BRPPUPP di tingkat korporat Triwulan I Tahun 2026 sebesar 111,67%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Sumber: Dashboard Aplikasi Kinerja BRPPUPP Triwulan I Tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026 terdapat 6 IKU dari 14 IKU BRPPUPP dan yang telah mencapai target sehingga 4 IKU berstatus biru dan 2 IKU berstatus hijau, IKU yang telah tercapai yaitu:

1. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok) dengan capaian di Triwulan I Tahun 2026 sebanyak 1 Kelompok dengan target sebanyak 1 Kelompok dengan persentase sebesar 100%
2. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPPUPP (Kelompok) tercapai sebanyak 120 kelompok dari target Triwulan I Tahun 2026 sebanyak 100 kelompok dengan persentase sebesar 120%.

3. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok) tercapai 7 kelompok dari target Triwulan I Tahun 2026 sebanyak 5 kelompok dengan persentase sebesar 120%.
4. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPPUPP (Unit) tercapai sebanyak 2 Unit dengan target 1 Unit dan persentase sebesar 120%
5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUPP (%) tercapai sebesar 86% dengan target sebesar 86% dengan persentase capaian 100%.
6. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di BRPPUPP (%) tercapai sebesar 100% dengan target yaitu sebesar 77% dengan persentase capaian 120%.

Capaian Indikator Kinerja Utama BRPPUPP Triwulan I Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TRIWULAN I TA. 2026		%
				TARGET	CAPAIAN	
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok)	1	1	100
		2	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPPUPP (Kelompok)	100	120	120
		3	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok)	5	7	120
		4	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPPUPP (Unit)	1	2	120
		5	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BRPPUPP (Paket)	-	-	-
		6	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan di BRPPUPP (Model)	-	-	-
		7	Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPPUPP (Orang)	-	-	-
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUPP (%)	86	86	100
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di BRPPUPP (Nilai)	-	-	-
		10	Penilaian Mandiri SAKIP di BRPPUPP (Nilai)	-	-	-
		11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di BRPPUPP (Nilai)	-	-	-
		12	Indeks Profesionalitas ASN di BRPPUPP (Indeks)	-	-	-
		13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPPUPP (Nilai)	-	-	-
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di BRPPUPP (%)	77	100	120

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, Triwulan I Tahun 2026

Secara umum kinerja BRPPUPP cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Belum terbitnya nomenklatur organisasi dan tata kerja BRPPUPP yang baru terkait perubahan tugas pokok dan fungsi BRPPUPP.
2. Dalam pencapaian IKU Penyuluhan masih banyak kendala seperti kurangnya jumlah penyuluh jika dibandingkan dengan target jumlah pelaku utama yang akan disuluh, penyusunan Profil Kelompok yang dibuat masih ada yang belum sesuai dengan format dan

tidak sesuai dengan kondisi update.

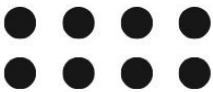
3. Proses pencapaian IKU Kelompok yang ditingkatkan kelas cenderung membutuhkan waktu yang tidak singkat dan proses yang panjang karena melibatkan banyak pihak .

Secara umum Kinerja BRPPUPP pada Triwulan I Tahun 2026 berjalan dengan baik, namun demikian untuk memastikan capaian kinerja dapat tercapai dengan maksimal pada Tahun berikutnya perlu dilakukan beberapa rekomendasi antara lain:

1. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat BPPSDM KP maupun Pusat terkait informasi nomenklatur organisasi, tata kerja, serta tugas pokok dan fungsi balai yang baru, dan menyampaikan progresnya di internal BRPPUPP secara berkala melalui kegiatan apel pagi maupun kegiatan koordinasi lainnya.
2. Menerapkan komitmen Bersama dalam pemenuhan target pencapaian IKU dengan dialog kinerja antara satminkal dan penyuluh perikanan agar profil kelompok yang disampaikan sesuai dengan format di perka BPPSDM dan sesuai batas waktu penyampaian
3. Menginventarisir calon kelompok yang akan ditingkatkan serta pengembangan Kompetensi dan Mindset Kelompok supaya lebih mandiri

Akhirnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders* BRPPUPP, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan dan membentuk pemerintahan yang baik (Good Governance) di lingkup BRPPUPP. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk melaksanakan amanah ini, sehingga diharapkan capaian kinerja Balai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran BRPPUPP Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 20,545,096,412 atau 23,69% dari pagu anggaran Rp. 86,738,262,000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

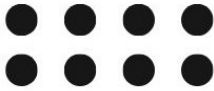
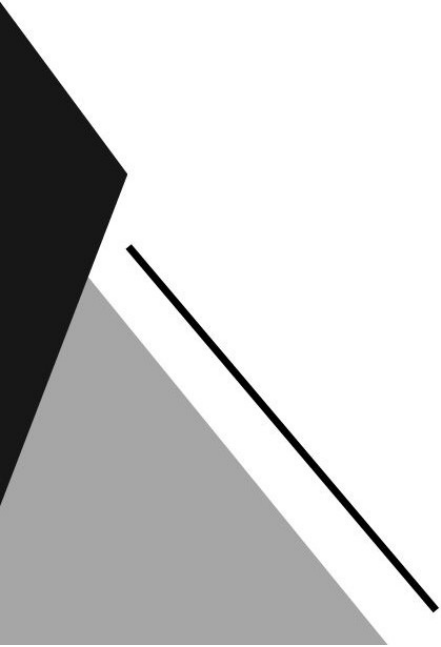
Tujuan

Tugas dan Fungsi

Keragaan SDM BRPPUPP

Sistematika Laporan Kinerja

Potensi dan Permasalahan



Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan
Penyuluhan Perikanan

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan ke-empat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pusat Penyuluhan KP (Pusluh) tahun 2020-2024, di mana mengacu pada Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Visi KKP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi KKP menjadi penting dengan keberadaan BPPSDM KP sebagai lembaga pendukung untuk mencapai tujuan RPJMN tahap IV. Peran strategis keberadaan BPPSDM KP yaitu mendukung visi dan misi KKP melalui pengembangan SDM.

Penyusunan Rencana Strategis BRPPUPP dilakukan sebagai tindak lanjut dari penataan kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mengatur pembentukan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) dan didalamnya juga mengatur tentang pembentukan PUSLUHKP dan BRPPUPP.

BRPPUPP telah berdiri sejak tahun 1969, merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset perikanan perairan umum daratan dan penyuluhan perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Salah satu tugas BRPPUPP adalah melaksanakan kegiatan maju dan penyuluhan di 5 (lima) provinsi yaitu provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu dan Lampung dengan jumlah penyuluh sebanyak 466 orang. Pelaksanaan riset meliputi ekosistem waduk, ekosistem danau, ekosistem sungai dan rawa banjir, ekosistem estuaria, di bidang biologi, ekologi, dinamika populasi, lingkungan sumber daya dan plasma nutfah ikan perairan umum daratan. Kegiatan riset dan penyuluhan BRPPUPP ini mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor KEP.176/MEN/KU.611/2017 tanggal 22 Desember 2016.

1.2 Tujuan

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja BRPPUPP ini, bertujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian Kinerja BRPPUPP pada TW I Tahun 2026.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BRPPUPP untuk meningkatkan Kinerjanya.

1.3 Tugas dan Fungsi

Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan yang selanjutnya disingkat BRPPUPP, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 73/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum Dan Penyuluhan Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang Riset Perikanan Perairan Umum Daratan dan Penyuluhan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Riset Perikanan. Institusi ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Riset Perikanan Perairan Umum Daratan yang meliputi seluruh wilayah Indonesia dan Penyuluhan Perikanan yang meliputi 5 (lima) Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.

Dalam melaksanakan tugasnya, BRPPUPP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset perikanan perairan umum dan penyuluh perikanan;
2. Pelaksanaan Riset Perikanan Perairan Umum Daratan meliputi ekosistem waduk, ekosistem danau, ekosistem sungai dan rawa banjir, dan ekosistem estuaria, di bidang biologi, ekologi, dinamika dan genetika populasi, lingkungan sumber daya dan plasma nutfah ikan perairan umum daratan;
3. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama Riset Perikanan Perairan Umum Daratan;
4. Penyusunan materi, metodologi, pelaksanaan penyuluhan perikanan, serta pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
5. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya, dan swasta;
6. Pengelolaan prasarana dan sarana riset perikanan perairan umum daratan dan penyuluhan perikanan; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
8. Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.

Keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BRPPUPP perlu dievaluasi, sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pasal 3, yaitu penyelenggaraan negara harus mengacu kepada azas proporsionalitas, profesional dan akuntabilitas.

Struktur organisasi BRPPUPP dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang membawahi Subbagian umum dan kelompok fungsional, namun saat ini pasca penyetaraan jabatan struktural ke fungsional masih terdapat Subkoordinator dan Pelaksana yang sebelumnya merupakan pejabat struktural eselon IV dan V yaitu:

Subkoordinator Tata Usaha, Subkoordinator Tata Operasional, dan Subkoordinator Pelayanan Teknis dan Sarana, serta Subkoordinator Penyuluhan. Subkoordinator Tata Usaha terdiri atas Pelaksana Urusan Keuangan dan Umum dan Pelaksana Urusan Kepegawaian, Subkoordinator Tata Operasional terdiri dari Pelaksana urusan Program dan Anggaran dan Pelaksana Monitoring dan Evaluasi, Subkoordinator Pelayanan Teknis dan Sarana terdiri atas Pelaksana Urusan Pelayanan Teknis dan Pelaksana Urusan Prasarana dan Sarana, dan Subkoordinator Penyuluhan terdiri atas Pelaksana urusan Kelembagaan Kelompok dan Pelaksana urusan Penyelenggaraan

Struktur organisasi BRPPUPP tersaji dalam gambar berikut.

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN
PENYULUHAN PERIKANAN



Gambar 1. Struktur Organisasi BRPPUPP

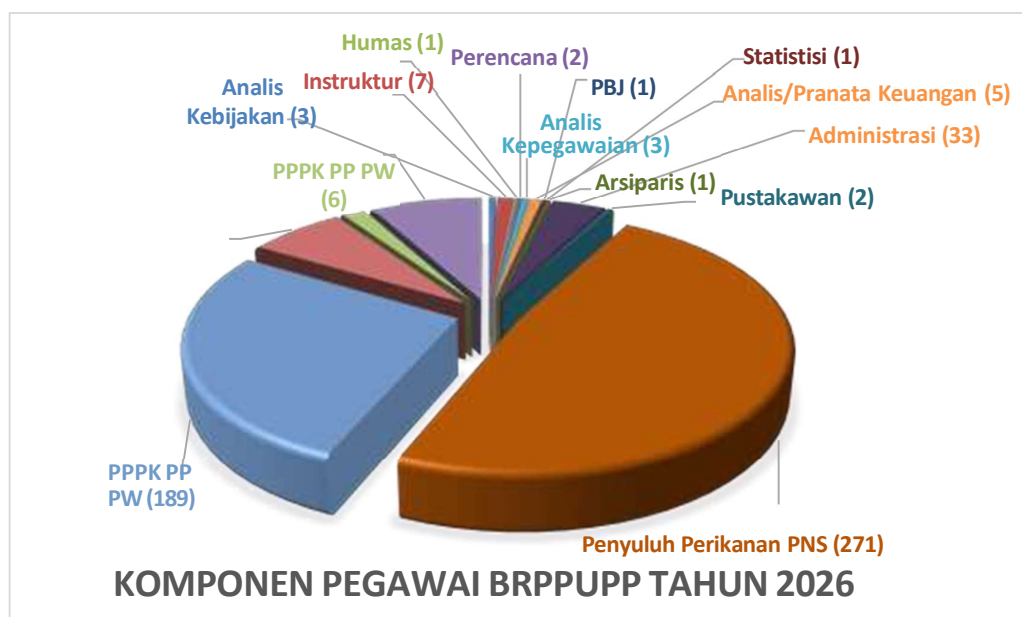
Berdasarkan Surat Tugas Nomor B. 833/BRSDM-BRPPUPP/KP.440/VIII/2023, Kepala BRPPUPP dibantu oleh 2 Tim Kerja yaitu Tim Kerja Manajerial dan Tim Kerja Penyuluhan untuk mewujudkan 14 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan uraian fungsi dan tugas sebagai berikut :

1. Rincian pelaksanaan kegiatan manajerial dan penyuluhan tersusun rapi
2. Peran anggota Tim Kerja terbagi sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan
3. Kegiatan sesuai dengan perencanaan
4. Memberikan umpan balik berkala kepada anggota Tim Kerja
5. Tersusunnya hasil kinerja anggota timnya kepada Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan
6. Terlaksananya kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antara anggota Tim Kerja

1.4 Keragaan SDM BRPPUPP

BRPPUPP Palembang dikepalai oleh seorang Kepala Balai (Eselon III), 1 Kasubbag Umum. Saat ini BRPPUPP didukung oleh 516 Pegawai terdiri atas terdiri atas 3 orang Analis Kebijakan, 7 orang Instruktur, 1 orang Humas, 2 orang Perencanaan, 3 orang Analis Kepegawaian, 5 orang Analis/Pranata Keuangan, 1 orang PBJ, 1 orang Statistisi, 1 orang Arsiparis, 33 orang tenaga Administrasi, 2 orang Pustakawan, 271 orang Penyuluh Perikanan PNS, 189 orang PPPK Penyuluh Perikanan Penuh Waktu, 6 orang PPPK Penyuluh Perikanan Paruh Waktu.

Jumlah pegawai BRPPUPP tersaji dalam grafik dibawah ini:



Sumber: Data Keragaan Pegawai BRPPUPP Tahun 2026

Gambar 2. Grafik Komponen Pegawai BRPPUPP Tahun 2026

1.5 Sistematika Laporan Kerja

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Triwulan I Tahun 2026.
2. Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang BRPPUPP seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di BPPSDM
3. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis BRPPUPP 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan, dan Penetapan kinerja BRPPUPP Tahun 2026 serta Pengukuran Kinerja Triwulan I Tahun 2026.
4. Bab IV Akuntabilitas Kinerja, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya
5. Bab IV Penutup, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi.
6. Lampiran, berisi lampiran Perjanjian Kinerja dan hal lain yang dianggap penting.

1.6 Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Produksi perikanan tangkap merupakan hasil perhitungan gabungan dari volume produksi yang didaratkan sektor usaha perikanan, sentra pendaratan hasil perikanan dan hasil estimasi di desa sampel yakni desa perikanan yang terpilih sebagai desa untuk dilakukan kegiatan pengumpulan/pendataan statistik perikanan tangkap, dipilih secara metodologi melalui kerangka survei. Sementara itu nilai produksi perikanan tangkap merupakan perhitungan gabungan dari nilai produksi yang didaratkan perusahaan perikanan, pelabuhan perikanan dan hasil estimasi di desa sampel yakni desa perikanan yang terpilih sebagai desa untuk dilakukan kegiatan pengumpulan/pendataan statistik perikanan tangkap, dipilih secara metodologi melalui kerangka survei. Produksi perikanan tangkap diarahkan untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan nasional dalam rangka pemenuhan protein hewani sebagai sumber gizi masyarakat yang berkualitas. Untuk komoditas tertentu juga mendukung peningkatan devisa negara melalui ekspor. Total data produksi yang disajikan dalam kerangka laporan produksi perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersumber dari data perolehan survei dan estimasi Dirjen Perikanan Tangkap. Hasil menggambarkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini karena dominasi data masih merupakan kontribusi besar sektor tangkap perikanan laut. Kenaikan volume produksi perikanan tangkap periode 2010-2014 rata-rata sebesar 4,52% per tahun, yaitu 5.384.418 ton pada tahun 2010 menjadi 6.200.180 ton pada tahun 2014. Produksi tetap didominasi perikanan tangkap di laut yaitu sebesar 5.779.990 (93,22%)

sedangkan produksi perikanan tangkap di perairan umum daratan sebesar 420.190 (7,27%).

Sementara itu, capaian nilai produksi perikanan tangkap tahun 2014 sebesar Rp 108,53 trilyun, terdiri dari nilai produksi perikanan tangkap di laut sebesar Rp 99,90 triliun dan perairan umum daratan sebesar Rp 8,62 triliun. Nilai produksi perikanan tangkap selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10,60% per tahun. Kenaikan terbesar disumbangkan dari perikanan tangkap di perairan laut.

Terus meningkatnya hasil produksi tangkap sektor perikanan pedalaman/ perairan umum dengan rata-rata 9,52% pertahun menjadi perhatian khusus. Di mana perikanan perairan umum sangat tergantung dengan wilayah tangkap yang juga digunakan untuk banyak kepentingan. Kegiatan penangkapan lestari yang berbasis dengan kelestarian sumberdaya ikan menjadi konsen penting dalam keberlanjutan perikanan perairan umum itu sendiri.

Keberadaan SDM KP yang kompeten memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Untuk mempercepat proses alih teknologi dan memperkuat kapasitas kelompok pelaku utama/pelaku usaha, pada tahun 2017 terdapat 5.783 orang Penyuluh Perikanan yang terdiri atas 2.500 orang Penyuluh Perikanan bantu, 3.283 orang penyuluh PNS, tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai tindaklanjut dari amanah ditetapkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan selanjutnya menjadi urusan Pemerintah Pusat yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Setelah melalui serangkaian proses identifikasi dan verifikasi personel, pendanaan, prasarana dan dokumen (P3D), maka sejak Juli 2017 seluruh Penyuluh Perikanan pengangkatan daerah secara status berubah menjadi Penyuluh Pusat. Terhitung mulai 01 Januari 2018 penyuluh perikanan secara administrasi dibagi menjadi 9 Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) yang tersebar di Indonesia.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang berdirinya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terjadi penggabungan pegawai sehingga seluruh peneliti diintegrasikan ke BRIN, dengan demikian fungsi BRPPUPP di bidang riset perikanan perairan umum daratan hilang dan berfokus di kegiatan manajerial dan Penyuluhan Perikanan.

b. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program riset dan penyuluhan untuk mendukung pembangunan KP antara lain:

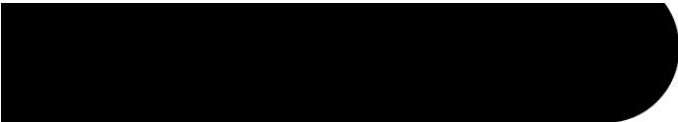
- 1) Belum terbitnya nomenklatur organisasi dan tata kerja BRPPUPP yang baru terkait perubahan tugas pokok dan fungsi BRPPUPP.
- 2) Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang berdirinya Badan

Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terjadi penggabungan pegawai sehingga seluruh peneliti diintegrasikan ke BRIN sehingga BRPPUPP akan mengalami transformasi kelembagaan dan tugas dan fungsi.

- 3) Jumlah sebaran dan kompetensi penyuluh perikanan masih terbatas dan belum memenuhi kebutuhan di lapang;
- 4) Penyuluh perikanan masih sulit mendapatkan akses terhadap teknologi informasi pasar, modal dan sumberdaya lainnya;
- 5) Aspek ketenagaan penyuluh perikanan, dimana Penyuluh Perikanan sangat berperan dalam pengenalan potensi wilayah dan sosial budaya, serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya:
 - i. Jumlah Penyuluh Perikanan yang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah pelaku utama yang akan disuluh;
 - ii. Masih terjadi alih tugas penyuluh perikanan PNS menjadi jabatan lainnya; Kompetensi sebagian penyuluh perikanan masih belum sesuai kebutuhan di lapangan;
 - iii. Penyebaran penyuluh perikanan tidak merata di semua kabupaten/kota potensi perikanan;
 - iv. Penyuluh perikanan masih sulit mendapatkan akses terhadap teknologi, informasi pasar, modal dan sumberdaya lainnya;
 - v. Peningkatan kompetensi penyuluh perikanan (diklat fungsional dan teknis) masih kurang.

Aspek Penyelenggaraan Penyuluhan, antara lain:

- i. Kelembagaan penyuluhan perikanan belum berjalan dengan optimal;
- ii. Legislasi dan regulasi belum seluruhnya tersedia;
- iii. Kualitas dan kuantitas (jumlah dan penyebaran) penyuluh perikanan masih belum memadai;
- iv. Penyelenggaraan penyuluhan sebagian polivalen, jejaring kerja terbatas dan penyebarluasan teknologi dari sumber ke pengguna teknologi belum berjalan secara efektif;
- v. Kuantitas dan kualitas materi penyuluhan perikanan masih terbatas dalam aksesibilitasnya;
- vi. Sarpras penyuluhan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas penyuluh;
- vii. Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan masih terbatas;
- viii. Batasan peran pemerintah daerah belum jelas, terutama terkait penyelenggaraan penyuluhan pasca UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BAB II

PERENCANAAN

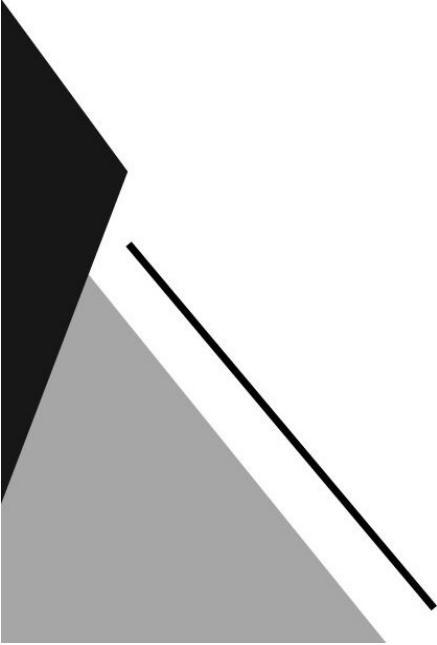
KINERJA

Rencana Strategis

Rencana Kerja Tahunan

Perjanjian Kinerja

Pengukuran Kinerja



Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan
Penyuluhan Perikanan

2.1 Rencana Strategis

Sektor kelautan dan perikanan memegang peran penting dalam mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, serta Misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional. Peran strategis tersebut selaras dengan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%, menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0%, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan pengelolaan laut dan perikanan yang berkelanjutan, inovatif, dan berbasis kesejahteraan, sektor ini diharapkan menjadi motor penggerak bagi terwujudnya Indonesia yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.

Perekonomian nasional diarahkan untuk tumbuh melalui sektor kelautan dan perikanan sebagai *engine of growth*. Produktivitas hasil perikanan ditingkatkan, sumber pertumbuhan baru dioptimalkan, dan nilai tambah diciptakan sehingga memberikan *multiplier effect* yang luas. Agenda penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui pendekatan inklusif yang menjangkau nelayan, pembudidaya, petambak garam, pengolah, pemasar, serta masyarakat pesisir yang rentan terhadap bencana iklim. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, diperlukan peran SDM yang inovatif, kompeten dan berdaya saing. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia diwujudkan melalui pendidikan, pelatihan, vokasi, dan penyuluhan yang sesuai kebutuhan industri, diperkuat dengan standardisasi serta sertifikasi kompetensi agar SDM kelautan dan perikanan dan pelaku usaha memiliki daya saing tinggi, adaptif terhadap teknologi, serta relevan dengan tuntutan pasar kerja.

Paradigma lama yang menitikberatkan pada peningkatan volume produksi tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan perlu ditinggalkan. Landasan pembangunan baru berorientasi pada ekonomi biru dengan prinsip ekologi sebagai panglima serta penyiapan SDM inovatif, kompeten, dan berdaya saing. Pendekatan ini menekankan pembangunan berkelanjutan, pengendalian tekanan ekosistem, peningkatan nilai tambah, serta penggunaan teknologi yang terukur, efisien, dan bertanggung jawab.

Paradigma ekonomi biru diwujudkan melalui lima kebijakan utama: (1) perluasan kawasan konservasi laut; (2) penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona; (3) pengembangan budi daya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; (4) pengawasan kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil; dan (5) pengurangan sampah plastik laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan SDM yang inovatif, kompeten dan berdaya saing untuk mensukseskan kebijakan *Blue Economy* KKP.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) berperan sentral dalam penyiapan SDM yang menjadi kunci keberhasilan kebijakan Blue Economy KKP. Strategi pengembangan SDM dijalankan melalui program penyuluhan, pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan standardisasi yang dituangkan dalam Rencana Strategis BPPSDM KP 2025–2029. Beberapa program utama yang dikedepankan meliputi:

1. Penyuluhan KP dengan pendekatan Super Extension (Suggestive, Useful, Performative, Effective, Reliable);
2. Pendidikan KP melalui pengembangan Ocean Institute of Indonesia (OII);
3. Pelatihan KP berbasis Corporate University dan Community Learning Center;
4. Standarisasi dan Sertifikasi SDM KP melalui Certification Agency (Certifa).

Keberadaan BRPPUPP sendiri memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi dan misi KKP dan BPPSDMKP melalui kegiatan penyuluhan perikanan sebagai berikut :

1. Peningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan secara optimal melalui pelatihan dan sertifikasi;
2. Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar dan peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan;
3. Membantu dalam meningkatkan ekonomi para pelaku usaha melalui penumbuhan dan pembentukan usaha mikro, kecil dan koperasi sektor kelautan dan perikanan; serta
4. Meningkatkan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan secara efektif dan efisien dan tepat sasaran melalui diseminasi dan pelatihan.

Salah satu kenyataan yang dihadapi pada sektor perikanan umumnya usaha perikanan didominasi oleh usaha skala kecil, tingkat pendidikan pembudidaya ikan, pengolah ikan maupun nelayan (pelaku utama) masih rendah, dan bermodal kecil.

Kondisi dengan skala usaha kecil umumnya belum mampu menerapkan teknologi inovatif sehingga menjadi kurang efisien dan akan berakibat pada penurunan kuantitas maupun kualitas produk yang dihasilkan. Hal utama yang harus dicermati adalah bahwa keberhasilan pembangunan perikanan sangat tergantung pada perubahan perilaku pelaku utama dalam menyikapi tantangan tersebut. Selain peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas, penyuluhan perikanan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan perikanan, karena mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pendidikan non formal bagi pelaku utama beserta keluarganya serta anggota masyarakat lainnya.

Dalam rangka mendukung program utama BPPSDMKP yang salah satunya adalah “Penyuluhan KP dengan pendekatan Super Extension (Suggestive, Useful, Performative, Effective, Reliable)” maka BRPPUPP menyusun Rancangan Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025-2029 sebagai pengganti Renstra BRPPUPP untuk periode tahun 2025-2029. Pada rancangan ini meliputi kegiatan, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja beserta targetnya pada tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel 1. Rancangan Indikator dan Target Kinerja BRPPUPP Tahun 2025-2029.

Rancangan Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025-2029				
				2025	2026	2027	2028	2029
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPPUPP (Kelompok)	3.430	4.625	5.109	5.536	6.113
		2	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok)	149	158	174	193	208
		3	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok)	442	530	467	467	454
		4	Nilai PNBPs Satker BRPPUPP (Rupiah Milyar)	0,0399	0,0450	0,0500	0,0420	0,0520
		5	Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPPUPP (Unit)	28	47	47	47	47
	Tersedianya IPTEK, Teknologi, Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Penyelenggaraan Penyuluhan KP	6	Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di satker BRPPUPP (Paket)	1	1	1	1	1
		7	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan oleh BRPPUPP (Model)	-	1	3	4	5
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	8	Sarana Penyuluhan KP yang Ditingkatkan Kapasitasnya oleh BRPPUPP	-	-	1	1	2
Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025-2029				
				2025	2026	2027	2028	2029
	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9	Prasarana Penyuluhan KP yang Ditingkatkan Kapasitasnya oleh BRPPUPP	-	-	3	2	2
		10	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPPUPP (Orang)	2	10	60	80	100
		11	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPPUPP (Orang)	10	16	18	20	22

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	12	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di Satker BRPPUPP (Dokumen)	1	-	1	1	1
		13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUPP (%)	85	86	87	88	89
		14	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)	92	92,1	92,15	92,2	92,2
		15	Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP (Nilai)	80	81	81,2	81,4	81,6
		16	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)	71,5	71,5	72	72,25	72,5
		17	Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (Indeks)	81	82	82	83	83
		18	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPPUPP (Nilai)	-	71	81	82	83
		19	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%)	80	77	78	79	80
		20	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di BRPPUPP (%)	80	81	82	83	84

Sumber : Rancangan Indikator dan Target Kinerja BRPPUPP Tahun 2025-2029

1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2025–2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Rumusan ini mencerminkan aspirasi nasional untuk menempatkan Indonesia sebagai negara maju yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan menjelang satu abad kemerdekaan. Pembangunan sumber daya manusia ditempatkan sebagai prioritas utama yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan ketahanan bangsa di tengah perubahan global yang cepat.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian visi nasional tersebut. Untuk periode 2025–2029, KKP merumuskan visi “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi ini menekankan bahwa keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan bukan hanya menjadi pilar ekonomi nasional, melainkan juga instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir serta memperkuat basis ekonomi biru Indonesia.

Sejalan dengan visi nasional dan kementerian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) merumuskan visi spesifik, yaitu “Terwujudnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing untuk mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”.

Visi tersebut menegaskan peran fundamental BPPSDMKP dalam membangun kapasitas manusia yang mampu menjawab tantangan kontemporer sektor kelautan dan perikanan. SDM yang inovatif akan mendorong lahirnya kreativitas serta adaptasi terhadap dinamika perubahan. SDM yang dimaksud adalah SDM pelaku usaha yang inovatif dan berdaya saing serta SDM calon tenaga kerja yang kompeten yang akan memastikan relevansi keterampilan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). SDM yang berdaya saing memperkuat posisi Indonesia dalam arena global yang sarat kompetisi.

Visi BRPPUPP adalah mendukung visi BPPSDMKP yang berlandaskan pada visi KKP yaitu “Terwujudnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing untuk mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”.

2. Misi

KKP mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tujuh dari delapan Asta Cita, dengan fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8. Misi tersebut disusun untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. “Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
2. “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
3. “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
4. “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang melaksanakan Asta Cita 7.

Dalam melaksanakan misi KKP yang ke-3 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Kelautan dan perikanan”, BPPSDMKP menetapkan misi yaitu “Mewujudkan SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing ditingkat Nasional dan Internasional”.

Misi BRPPUPP adalah mendukung misi BPPSDMKP yang berlandaskan pada Misi KKP yaitu “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Kelautan dan perikanan”, BPPSDMKP menetapkan misi yaitu “Mewujudkan SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing ditingkat Nasional dan Internasional” melalui pendampingan kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung yang dilaksanakan oleh Penyuluh Perikanan BRPPUPP yang meliputi 5 propinsi, yaitu Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Lampung dan Bangka Belitung.

3. Tujuan

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah naungan BPPSDMKP, maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2025-2029 harus mampu menjalankan tujuan dari BPPSDMKP tersebut. Tujuan yang ingin dicapai BRPPUPP selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, dan kesejahteraan pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan.**
- 2. Membuat inovasi teknologi hasil percontohan penyuluhan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.**
- 3. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BRPPUPP.**

4. Sasaran Strategis

Pada tahun 2026 ini, Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan dan 14 (empat belas) indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan pada perjanjian kinerja sebagai bentuk dukungan untuk mencapai sasaran strategis pada level 0 Kementerian Kelautan dan Perikanan, sasaran program pada level 1 BPPSDMKP, serta sasaran kegiatan pada level 2 Pusat Penyuluhan KP. Dari 5 (lima) sasaran strategis pada level 0 KKP dan 14 (empat belas) indikator kinerja, BRPPUPP mendukung 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja, sebagai berikut:

- 1. SS4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan**
IK13. Indeks Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
- 2. SS5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas**
IK14. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) KKP

Sedangkan dari 2 (dua) sasaran program dan 3 (tiga) indikator kinerja program pada level 1 BPPSDM, BRPPUPP mendukung 2 (dua) sasaran program dan 2 (dua) indikator kinerja program, yaitu:

- 1. SP1. Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan**
IKP2. Persentase Peningkatan Omzet pada Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya
- 2. SP2. Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**
IKP3. Nilai implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan

Pada tahun 2026 terdapat perubahan organisasi dan tata laksana lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 tahun 2025, dimana terdapat 5 (lima) eselon II di lingkup BPPSDMKP, yaitu :(1) Sekretariat BPPSDMKP, (2) Pusat Penyuluhan KP, (3) Pusat Pendidikan KP, (4) Pusat Pelatihan KP, dan (5) Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan karena memiliki tugas pokok dan fungsi kegiatan penyuluhan, sehingga berada dibawah koordinasi Pusat Penyuluhan KP.

Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan pada Tahun 2026 mendukung sasaran kegiatan pada Level 2 Pusat Penyuluhan KP. Dari 2 (dua) sasaran kegiatan dan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja kegiatan, BRPPUPP mendukung 2 (dua) sasaran kegiatan dan 14 (empat belas) indikator kinerja kegiatan, yaitu:

SK1. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

IKK1. Persentase Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya (%)

IKK2. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh (kelompok)

IKK3. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk (Kelompok)

IKK4. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPPUPP (Unit)

IKK5. Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BRPPUPP (Paket)

IKK6. Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan di BRPPUPP (Model)

IKK7. Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPPUPP (Orang)

SK2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

IKK8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUPP (%)

IKK9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di BRPPUPP (Nilai)

IKK10. Penilaian Mandiri SAKIP di BRPPUPP (Nilai)

IKK11. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di BRPPUPP (Nilai)

IKK12. Indeks Profesionalitas ASN di BRPPUPP (Indeks)

IKK13. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPPUPP (Nilai)

IKK.14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di BRPPUPP (%)

Selanjutnya, BRPPUPP mendukung sasaran strategis level 0, sasaran program level 1, dan sasaran kegiatan level 2 pada Tahun 2026, melalui sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

SK1. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

IKK1. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok) pada Tahun 2026 memiliki target sejumlah 158 kelompok

IKK2. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPPUPP (Kelompok) Tahun 2026 memiliki target sejumlah 4.625 kelompok

IKK3. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok) pada tahun 2026 memiliki target sejumlah 530 kelompok

IKK4. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPPUPP (Unit) memiliki target sejumlah 47 unit

IKK5. Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BRPPUPP (Paket) memiliki target 1 Paket.

IKK6. Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan di BRPPUPP (Model) target sejumlah 1 model.

IKK7. Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPPUPP (Orang) memiliki target sejumlah 10 orang

SK2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

IKK8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUPP (%) memiliki target sejumlah 86 %

IKK9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di BRPPUPP (Nilai) memiliki target sebesar 92,10

IKK10. Penilaian Mandiri SAKIP di BRPPUPP (Nilai) memiliki target nilai sebesar 81

IKK11. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di BRPPUPP (Nilai) memiliki target nilai sebesar 71,75

IKK12. Indeks Profesionalitas ASN di BRPPUPP (Indeks) memiliki target nilai sebesar 82

IKK13. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPPUPP (Nilai) memiliki target indeks sebesar 71

IKK14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di BRPPUPP (%) memiliki target persentase sebesar 77%

2.2. Rencana Kerja Tahunan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja BRPPUPP Tahun 2026 menetapkan 2 (dua) program yaitu Pendidikan dan pelatihan vokasi, Riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran Rp.86.738.262.000,-

Berikut tabel yang menyajikan rencana kegiatan beserta perubahan anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2026.

Tabel 2. Rencana Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2026.

NO	PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI ke-4	ANGGARAN REVISI ke-9	ANGGARAN REVISI ke-13
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.546.805.000	3.016.052.000	2.912.400.000	2.912.400.000
	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	3.546.805.000	3.016.052.000	2.912.400.000	2.912.400.000
2	Program Dukungan Manajemen	72.241.324.000	72.241.324.000	70.315.899.000	76.436.279.000
	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	72.241.324.000	72.241.324.000	70.315.899.000	76.436.279.000
	Total Anggaran BRPPUPP tahun 2026	75.788.129.000	75.257.376.000	73.228.299.000	79.348.679.000

Sumber : DIPA dan RKAKL Awal BRPPUPP Tahun 2025, DIPA dan RKAKL Revisi ke-04 Tahun 2025, DIPA dan RKAKL Revisi ke-09, DIPA dan RKAKL Revisi ke-13

Pada Triwulan I Tahun 2026, revisi anggaran dilaksanakan sebanyak 15 kali, namun revisi yang terdapat perubahan anggaran sebanyak 3 kali, yaitu :

1. Revisi ke 04: yaitu revisi Rekomposisi Blokir dan Pemenuhan Honor tenaga Non ASN (PPB dan PPNPM).
2. Revisi ke 09: Revisi anggaran dalam rangka hapus blokir.
3. Revisi ke 13: Yaitu Revisi penambahan pagu untuk gaji minus TA 2025.

2.3. Perjanjian Kinerja

Dengan terbitnya Permen KP No.2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat perubahan susunan organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) dimana terdapat 5 (lima) Eselon II di lingkup BPPSDMKP, yaitu : (1) Sekretariat BPPSDMKP, (2) Pusat Penyuluhan KP, (3) Pusat Pendidikan KP, (4) Pusat Pelatihan KP, dan (5) Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan karena memiliki tugas pokok dan fungsi kegiatan penyuluhan, sehingga berada dibawah koordinasi Pusat Penyuluhan KP. Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) memiliki perjanjian kinerja

dengan Pusat Penyuluhan KP yang ditandatangani pada tanggal 6 bulan Januari 2026.

Pada Tahun 2026 BRPPUPP memiliki Perjanjian Kinerja dengan Pusat Penyuluhan KP sebagai berikut.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja antara Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan dengan Pusat Penyuluhan KP Tahun 2026.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026				
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN				
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok)	158
		2	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPPUPP (Kelompok)	4.625
		3	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok)	530
		4	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPPUPP (Unit)	47
		5	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BRPPUPP (Paket)	1
		6	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan di BRPPUPP (Model)	1
		7	Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPPUPP (Orang)	10
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUPP (%)	86
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di BRPPUPP (Nilai)	92,1
		10	Penilaian Mandiri SAKIP di BRPPUPP (Nilai)	81
		11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di BRPPUPP (Nilai)	71,75
		12	Indeks Profesionalitas ASN di BRPPUPP (Indeks)	82
		13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPPUPP (Nilai)	71
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di BRPPUPP (%)	77

Sumber : Perjanjian Kinerja BRPPUPP 6 Januari Tahun 2026

Pada perjanjian kinerja di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan BRPPUPP memiliki 2 sasaran kegiatan yang harus dicapai oleh Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan. Untuk setiap sasaran kegiatan yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja (IK). Keseluruhan indikator kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan pada tahun 2026 untuk semua sasaran kegiatan adalah berjumlah 14 indikator kinerja (IK).

Perjanjian kinerja sebagaimana tercantum pada Tabel 3 di atas, selanjutnya dituangkan ke dalam rencana aksi atau inisiatif strategis. Rencana aksi atau inisiatif strategis adalah kegiatan yang tertuang di rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA-KL) yang merupakan kegiatan pendukung dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Masing-masing kegiatan yang terdapat di RKA-KL terkait dengan anggaran tahun berjalan. Penanggung jawab kegiatan di RKA-KL terkait juga dengan penanggung jawab indikator kinerja yang dibagi oleh Kepala Balai ke ke tim kerja lingkup BRPPUPP.

2.4. Pengukuran Kinerja

1. Rumus Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BRPUPP Tahun 2026, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- 1) Angka maksimum adalah 120;
- 2) Angka minimum adalah 0;
- 3) Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
- 4) Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



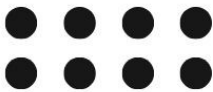
Gambar 3. Status Indeks capaian IKU.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja lingkup BRPPUPP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran, telah ditugaskan kepada Tim SAKIP dan Laporan Kinerja BRPPUPP yang ditetapkan melalui ditetapkan Surat Perintah Kepala BRPPUPP NOMOR : 1167/BRPPUPP/TU.110/I/2026 tanggal 09 Januari 2026 tentang Tim Pengelola Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.

Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja Tahun 2026 dipantau oleh Tim SAKIP dan Laporan Kinerja yang menjadi penanggung jawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada Kepala BRPPUPP. Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan, seksi Tata Operasional BRPPUPP merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BAB III

AKUNTABILITAS

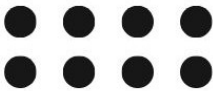
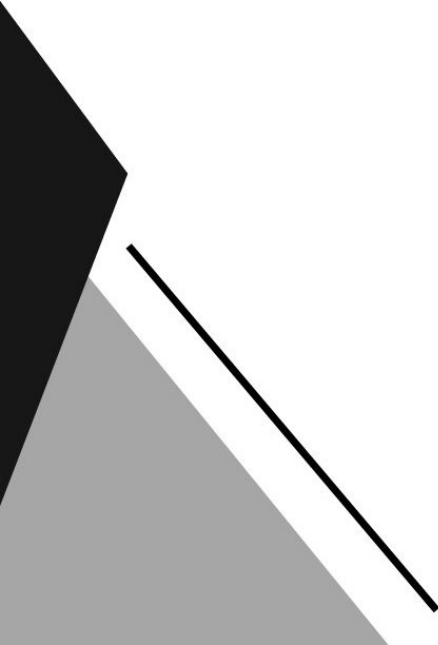
KINERJA

Prestasi Indikator Kinerja Tahun 2026

Evaluasi dan Analisis Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumberdaya
BRPPUPP Tahun 2026

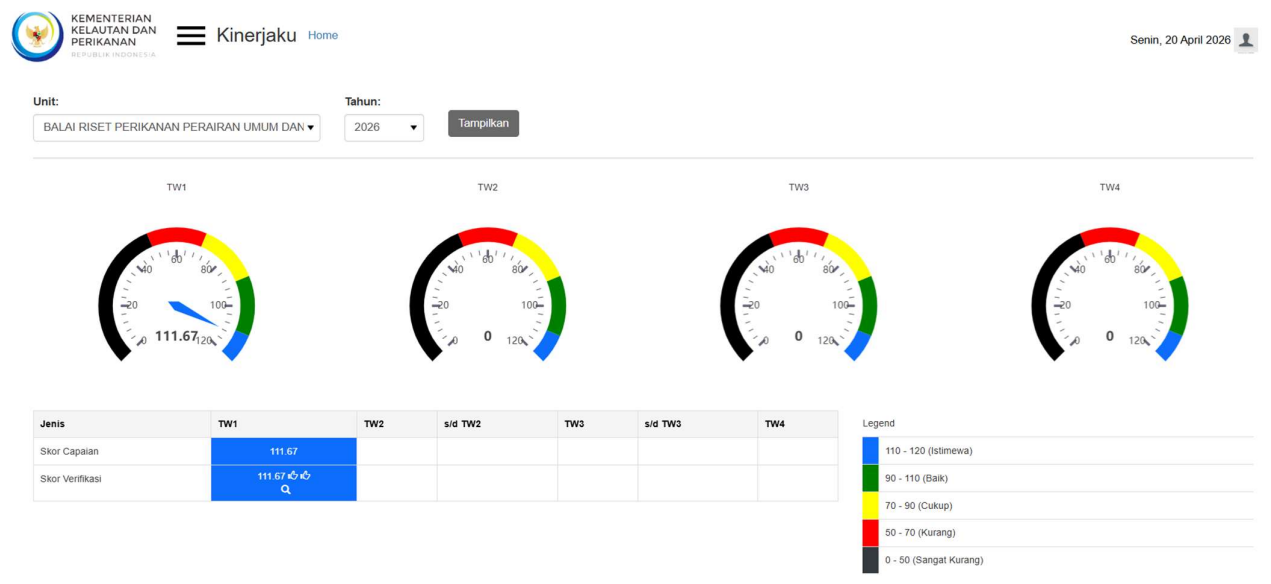


Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan
Penyuluhan Perikanan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Prestasi Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Pengukuran capaian kinerja BRPPUPP Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BRPPUPP di tingkat korporat Triwulan I Tahun 2026 sebesar 111,67% per 20 April 2026, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 4. Dashboard Kinerja BRPPUPP Trwulan I Tahun 2026.

Pada gambar dashboard capaian kinerja BRPPUPP Triwulan I Tahun 2026 diatas dapat dilihat bahwa skor capaian kinerja BRPPUPP pada Triwulan I Tahun 2025 masuk ke dalam kategori istimewa yaitu dengan skor kinerja 111,67%.

Pada Triwulan I Tahun 2026, dari 14 indikator kinerja yang menjadi target kinerja BRPPUPP telah sebanyak 6 Indikator yang dimana sebanyak 4 indikator kinerja masuk ke dalam kategori istimewa dengan indikator warna biru dan 2 indikator kinerja masuk ke dalam kategori baik dengan indikator warna hijau karena telah mencapai target yang telah ditetapkan di perjanjian kinerja. Rincian target dan realisasi indikator kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BRPPUPP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi BRPPUPP yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2026 dapat tercapai.

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TRIWULAN I TA. 2026		%
				TARGET	CAPAIAN	
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok)	1	1	100
		2	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPPUPP (Kelompok)	100	120	120
		3	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok)	5	7	120
		4	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPPUPP (Unit)	1	2	120
		5	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BRPPUPP (Paket)	-	-	-
		6	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan di BRPPUPP (Model)	-	-	-
		7	Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPPUPP (Orang)	-	-	-
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUPP (%)	86	86	100
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di BRPPUPP (Nilai)	-	-	-
		10	Penilaian Mandiri SAKIP di BRPPUPP (Nilai)	-	-	-
		11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di BRPPUPP (Nilai)	-	-	-
		12	Indeks Profesionalitas ASN di BRPPUPP (Indeks)	-	-	-
		13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPPUPP (Nilai)	-	-	-
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di BRPPUPP (%)	77	100	120

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku Triwulan I Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN 1 :

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja 1

Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok). Jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang meningkat kelasnya setelah mendapatkan pendampingan penyuluh Kelautan dan Perikanan, dengan kriteria sesuai Permen KP no 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan, dimana pengukuhan dilakukan oleh Kepala desa/lurah, camat, Kepala Dinas yang membidangi urusan perikanan setempat, Kepala BPPSDMKP sesuai dengan kriteria kelas kemampuan kelompok yang dikukuhkan dan mendapatkan piagam pengukuhan/sertifikat apresiasi peningkatan kelas kemampuan kelompok.

Adapun pengukuran untuk IKU ini yaitu menghitung Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan kelasnya dan memenuhi kriteria peningkatan kelas (kelas pemula ke lanjut, kelas lanjut ke madya, kelas madya ke kelas Utama) dari Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan kelasnya yang telah dilakukan pendampingan dan penilaian serta dalam proses penetapan, diperiode akhir tahun yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

Tabel 5. Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok).

Realisasi Triwulan I Tahun				Triwulan I Tahun 2026				RANCANGAN IK 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian
-	2	6	1	1	1	100	-	208	0,48

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Pada Triwulan I Tahun 2026 ini telah mendapat realisasi sebanyak 1 kelompok dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 1 kelompok, sehingga persentase capaian untuk indikator ini sebesar 100%. Pada tabel diatas dapat dilihat capaian tahun 202-2025 dimana capaiannya mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 capaiannya adalah sejumlah 0 kelompok. Pada tahun 2023 capaiannya adalah sejumlah 2 kelompok, pada tahun 2024 capaiannya adalah sejumlah 6 kelompok dan pada tahun 2025 capaiannya adalah sejumlah 1 kelompok. Perolehan capaian indikator kinerja yang melebihi target ini dapat dikarenakan kinerja penyuluh perikanan SATMINKAL BRPPUPP sangat baik dan mengalami peningkatan kinerja di Triwulan I Tahun 2026. Pada tabel 6. diatas, dapat dilihat juga persentase capaian Triwulan I Tahun 2026 jika dibandingkan dengan target Tahun 2029 pada Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025–2029 persentase capaiannya adalah sebesar 0,48%.

Perolehan nilai capaian indikator berikut dapat dikarenakan penyuluh SATMINKAL BRPPUPP telah menunjukkan kinerja yang baik dalam meningkatkan kelas kelompok kelautan dan perikanan yang mereka bina, sehingga capaian pada indikator berikut dapat mencapai target.

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok) pada Triwulan I Tahun 2026 dapat mencapai target antara lain adalah telah dilakukannya pendampingan kelompok oleh Penyuluh perikanan serta melakukan penilaian kelas terhadap kelompok binaannya untuk mencapai target kinerja sesuai jabatan dan merupakan IKU utama penyuluh yang nantinya dituangkan di SKP.

Kelompok yang telah dilakukan penilaian telah memenuhi kriteria untuk dapat dinaikkan kelasnya sesuai dengan Kepmen KP No.14 Tahun 2012 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

- a) Rapat Monitoring Capaian Kinerja yang dilaksanakan BRPPUPP setiap triwulan
- b) Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusluh KP dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPPUPP dengan Kepala Pusluh KP,
- c) Penilaian dan Pengukuhan Kelas Kemampuan Kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan;
- d) Validasi data capaian Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya.

Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup BPPSDM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Perbandingan Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok).

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	1	1	100
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	5	6	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	1	2	120
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	1	1	100

Sumber: LKj UPT

Dari tabel di atas menunjukan bahwa BRPPUPP mencapai target yang telah ditentukan, BRPPUPP termasuk Satminkal yang capaiannya 100%.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang ditingkatkan oleh Penyuluh KP dengan anggaran sebesar Rp. 728.100.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 728.029.700,- (99,99%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar

107,38% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,39%.

Indikator Kinerja 2

Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPPUPP (Kelompok) merupakan Jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan meliputi: fasilitasi akses informasi, akses teknologi terekomendasi dan/atau tepat guna, akses pasar, akses permodalan, dan akses perizinan berusaha dan/atau manajemen mutu. Pelaksanaan penyuluhan terhadap pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Setiap kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung yang telah disuluh, wajib dibuatkan profil kelompoknya, mengacu pada Keputusan Kepala BPPSDM KP Nomor 319 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Profil Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan. Setiap kelompok memiliki kode Registrasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala BPPSDMKP/ Surat Kepala Pusat Penyuluhan KP tentang Pedoman Administrasi dan Profil Kelompok Kelautan dan Perikanan TW 1 Tahun 2026.

Adapun cara pengukuran untuk IKU ini yaitu Jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung yang disuluh disusun profil kelompoknya sesuai pedoman penyusunan profil.

Tabel 7. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPPUPP (Kelompok).

Realisasi Triwulan I Tahun				TRIWULAN I Tahun 2026				RANCANGAN IK 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target TW I TA 2026	Realisasi TW I TA 2026	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian
2.671	991	1.110	110	100	120	120	109,09	6.113	1,96

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

Pada Triwulan I Tahun 2026 capaian indikator kinerja ini telah mencapai persentase sebesar 120% dari target yang ditetapkan, realisasi yang didapat adalah sebesar 120 kelompok dengan target di TW I Tahun 2026 sebanyak 100 kelompok. Pada tabel diatas dapat dilihat capaian tahun 2022-2025 dimana capaiannya mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada TW I tahun 2022 capaiannya adalah sejumlah 2.671 kelompok. Pada TW I tahun 2023 capaiannya adalah sejumlah 991 kelompok, pada TW I tahun 2024 capaiannya adalah sejumlah 1.110 kelompok dan pada TW I tahun 2025 capaiannya adalah sejumlah 110 kelompok. Jika dibandingkan dengan capaian pada TW I tahun 2025 maka capaian pada TW I tahun 2026 untuk indikator kinerja ini mengalami kenaikan sejumlah 10 kelompok (9,09%) Perolehan capaian indikator kinerja yang melebihi target ini dapat dikarenakan kinerja penyuluh perikanan SATMINKAL BRPPUPP sangat baik dan mengalami peningkatan kinerja di TW I Tahun 2026.

Pada tabel 4. diatas, dapat dilihat juga persentase capaian Triwulan I Tahun 2026 jika dibandingkan dengan target tahun 2029 pada Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025–2029 persentase capaiannya adalah sebesar 1,96%.

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung yang disuluh di BRPPUPP dapat melampaui target antara lain adalah :

1. Penyuluh perikanan memiliki tugas pokok yaitu melakukan penyuluhan kelompok dan harus dituangkan di SKP, sehingga seluruh Penyuluh harus mencapai targetnya;
2. Terbitnya Peraturan Kepala BPPSDM KP No. 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Penyuluh Perikanan, Asisten Penyuluh Perikanan, Penyuluh Perikanan P3K, dan Penyuluh Perikanan Bantu yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas serta target yang harus dicapai oleh penyuluh;
3. Profil Kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung yang disuluh disusun dan diperbarui sebagai data dukung indikator kinerja Kelompok Pelaku usaha/Pelaku pendukung yang Disuluh.

Kegiatan yang dilakukan sebagai penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain adalah:

1. Pendampingan dan Penyusunan profil Kelompok Pelaku utama/Pelaku Usaha
2. Verifikasi dan validasi Kelompok Pelaku utama/Pelaku Usaha yang disuluh

Selain itu terdapat kegiatan lain yang dilaksanakan dalam rangka tercapainya indikator kinerja ini, yaitu : (1) Memasukkan target pendampingan beserta penyusunan profil kelompok yang sesuai ketentuan pada SKP penyuluh perikanan sesuai dengan jenjang jabatannya, (2) Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPPUPP melalui kegiatan : (a) pembinaan kinerja penyuluh perikanan dan evaluasi capaian kinerja penyuluh perikanan baik yang dilaksanakan secara luring di wilayah kerja penyuluh perikanan maupun daring melalui zoom meeting, (b) laporan mingguan dan bulanan internal BRPPUPP, (c) verifikasi data dukung secara on line melalui aplikasi SIMPEL-KP, serta (d) kegiatan pengukuran kinerja yang dilaksanakan per triwulan di internal BRPPUPP.

Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BRPPUPP (Kelompok) ini jika dibandingkan dengan 3 (tiga) Satminkal lain lingkup Pusluh KP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Perbandingan Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPPUPP (Kelompok) TW I Tahun 2026 dengan Satminkal Lain.

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	100	120	120
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	500	600	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	50	50	100
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	100	120	120

Sumber: LKj UPT

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa BRPPUPP mencapai target yang telah ditentukan. BRPPUPP Satminkal yang capaiannya 120% dan untuk UPT lain capaiannya telah melebihi 110%. Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan memiliki peran yang sangat penting dikarenakan penyuluhan bukan saja berperan dalam kegiatan prakondisi masyarakat agar tahu, mau dan mampu berperan serta dalam pembangunan kelautan dan perikanan, akan tetapi juga berintegrasi dengan fungsi pendampingan yang secara terus menerus sehingga tumbuh kemandirian dalam usaha kelautan dan perikanan yang akhirnya meningkatkan produktivitas usahanya.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang mendapatkan pendampingan dari Penyuluh KP dengan anggaran sebesar Rp. 728.100.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 728.029.700,- (99,99%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 100% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,2%.

Indikator Kinerja 3

Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok) merupakan Jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang dibentuk setelah mendapatkan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan yang dibuktikan Surat Pengesahan Pembentukan Kelompok. Pembentukan kelompok mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, serta Keputusan Kepala BPPSDM KP Nomor 319 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Profil Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.

Adapun cara pengukuran IKU ini yaitu Hitung Jumlah kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang dibentuk dan memenuhi kriteria pembentukkan kelompok dan Jumlah kelompok Kelautan dan Perikanan yang telah dilakukan pendampingan dan pembentukan kelompok serta dalam proses pengukuhan diperiode akhir tahun yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

Tabel 9. Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok).

Realisasi TW I Tahun				Triwulan I Tahun 2026				RANCANGAN IK 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target TW I TA 2026	Realisasi TW I TA 2026	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian
195	128	131	12	5	7	120	- 41,67	454	1,54

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Pada Triwulan I Tahun 2026 ini capaian indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan yaitu tercapai 7 kelompok dari target sebanyak 5 kelompok. Jika dibandingkan dengan realisasi di Triwulan I Tahun 2025, indikator ini memiliki penurunan sebesar 41,67% dengan jumlah realisasi di tahun sebelumnya sebanyak 12 kelompok.

Pada tabel diatas dapat dilihat capaian TW I Tahun 2022-2025 dimana capaiannya mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada TW I Tahun 2022 capaiannya adalah sejumlah 195 kelompok. Pada TW I Tahun 2023 capaiannya adalah sejumlah 128 kelompok, pada TW I Tahun 2024 capaiannya adalah sejumlah 131 kelompok dan pada TW I Tahun 2025 capaiannya adalah sejumlah 12 kelompok.

Pada tabel 8 diatas, dapat dilihat juga persentase capaian TW I Tahun 2026 jika dibandingkan dengan target tahun 2029 pada Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025–2029 persentase capaiannya adalah sebesar 1,54%.

Terlampauinya capaian dari target yang telah ditetapkan serta terjadi nya kenaikan persentase dibandingkan dengan tahun sebelumnya juga dapat dikarenakan banyak potensi di wilayah binaan yang dapat ditumbuhkan menjadi kelompok baru serta kinerja penyuluh SATMINKAL BRPPUPP sangat baik sehingga dapat membentuk banyak kelompok baru di wilayah binaan penyuluh masing-masing.

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja kelompok pelaku usaha/ pelaku pendukung yang dibentuk oleh BRPPUPP pada TW I Tahun 2026 dapat melampaui target antara lain adalah:

1. Pembentukan kelompok merupakan salah satu tugas pokok penyuluh perikanan yang tertuang di SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) Penyuluh Perikanan sehingga setiap Penyuluh harus mencapai targetnya;
2. Banyak potensi di wilayah binaan yang dapat ditumbuhkan menjadi kelompok baru sehingga penyuluh dapat mencapai targetnya.

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

- a) Pembentukan kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan
- b) Validasi data capaian Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk

Capaian Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup BPPSDM dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 10. Perbandingan Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok)

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	5	7	120
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	15	19	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	5	6	120
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	10	12	120

Sumber: LKj UPT

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian BRPPUPP telah melebihi target yang telah ditentukan. BRPPUPP termasuk Satminkal yang capaiannya lebih dari 100%, yaitu mencapai persentase 120%, begitu pula dengan satminkal lainnya capaian IKU ini sdh di atas 100%

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang dibentuk oleh Penyuluh KP dengan anggaran sebesar Rp. 728.100.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 728.029.700,- (99,99%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 105,20% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,21%.

Indikator Kinerja 4

Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPPUPP (Unit). Jumlah Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang didampingi oleh Penyuluh Perikanan dengan kriteria sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, serta Keputusan Kepala BPPSDM KP Nomor 319 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Profil Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan yang dibuktikan dengan Surat Pengesahan Gapokkan/ Akta Kopdeskel Merah Putih.

Tabel 11. Capaian IKU Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPPUPP (Unit).

Realisasi TW I Tahun				Triwulan I Tahun 2026				RANCANGAN IK 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target TW I TA 2026	Realisasi TW I TA 2026	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian
-	-	-	5	1	2	120	- 60	47	4,25

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Pada Indikator Kinerja ini capaian kinerjanya berasal dari Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh penyuluh kelautan dan perikanan. Berdasarkan tabel diatas pada Triwulan I Tahun 2026 capaian indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu tercapai 2 unit dari target sebanyak 1 unit.

Pada tabel diatas dapat dilihat capaian TW I Tahun 2022-2024 belum terdapat capaian karena belum terdapat IKU ini ditahun tersebut. Pada TW I Tahun 2025 capaiannya adalah sejumlah 5 unit. Pada TW I Tahun 2026 capaiannya adalah sejumlah 2 unit.

Pada tabel 10 diatas, dapat dilihat juga persentase capaian TW I Tahun 2026 jika dibandingkan dengan target tahun 2029 pada Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025–2029 persentase capaiannya adalah sebesar 4,25%.

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPPUPP pada Triwulan I tahun 2026 dapat melampaui target antara lain adalah:

1. Penyuluh telah melakukan kegiatan pendampingan kepada gapokkan dan/atau koperasi yang telah terbentuk sebelumnya yang merupakan salah satu tugas pokok penyuluh perikanan yang tertuang di SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) penyuluh sehingga setiap penyuluh harus mencapai targetnya sesuai dengan jenjang jabatannya.
2. Penyuluh melakukan kegiatan pendampingan dalam bentuk fasilitasi pembentukan koperasi baru pada tahun 2025.
3. Profil gapokkan / koperasi / korporasi telah disusun / diupdate oleh penyuluh perikanan sesuai format berdasarkan surat:

(1) Surat Kapusluh KP No.B.714/BPPSDM.2/RSDM.530/III/2025, tanggal 13 Maret 2025 perihal "Kodifikasi Nomor Registrasi dan Profil";

(2) Surat Kapusluh KP No. B.759/BPPSDM.2/RSDM.530/III/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal "Kodifikasi dan Profil Gabungan Kelompok Sektor KP";

(3) Surat Kapusluh KP No. B.1941/BPPSDM.2/RSDM.530/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 perihal "Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan".

Kegiatan yang dilakukan sebagai penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Pendampingan dan Penyusunan profil Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi sektor kelautan dan perikanan;
2. Validasi data capaian Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang mendapatkan pendampingan.

Capaian IKU Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih BRPPUPP ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup BPPSDM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Perbandingan Capaian IKU Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPPUPP (Unit).

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	1	2	120
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	20	24	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	5	6	120
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	1	1	100

Sumber: LKj UPT

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa BRPPUPP dan 2 Satker lainnya memperoleh 120% yang artinya capaian untuk IKU ini seluruh telah mencapai target yang ditentukan.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi oleh Penyuluh KP dengan anggaran sebesar Rp. 728.100.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 728.029.700,- (99,99%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 20,01%.

Indikator Kinerja 5

Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BRPPUPP (Paket), definisi dari IKU ini yaitu Media Penyuluhan adalah segala jenis alat bantu, sarana, atau perantara yang digunakan oleh penyuluh untuk menyampaikan pesan, informasi, atau teknologi kepada masyarakat KP secara lebih efektif, jelas, dan menarik. Media Penyuluhan terdiri dari materi 1. pengembangan sumber daya manusia; 2. peningkatan modal sosial budaya; 3. Ilmu pengetahuan dan teknologi; 4. informasi; 5. ekonomi; 6. manajemen; 7. hukum; dan/atau 8. pelestarian lingkungan. Media Penyuluhan dapat berupa media terdengar, media cetak, media tertayang dan/atau media sosial. Satu paket media penyuluhan minimal tersusun dari dua materi wajib (teknologi dan pelestarian lingkungan), dan diperbolehkan jika memuat materi selain dua materi tersebut. Sumber materi penyuluhan terstandar yang akan disusun menjadi media penyuluhan dapat diakses pada laman Knowledge Management System (KMS) Materi Penyuluhan KP(<https://sites.google.com/view/pelaksanaan-penyuluhan-kp/beranda>) dan sumber data/informasi lain yang valid dari unit kerja lingkup KKP dan/atau dari Kementerian/Lembaga lainnya. Penyusunan Media Penyuluhan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Kepala BRSDM KP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Pemanfaatan Materi dan Media Penyuluhan Kelautan dan Perikanan secara daring.

Tabel 13. Capaian IKU Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BRPPUPP (Paket).

Realisasi TW I Tahun				Triwulan I Tahun 2026				RANCANGAN IK 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target TW I TA 2026	Realisasi TW I TA 2026	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Pada Indikator Kinerja ini capaian kinerjanya berasal dari Media penyuluhan dalam bentuk softcopy/file yang telah disusun oleh Satminkal sesuai kebutuhan pelaku usaha untuk digunakan Penyuluh Perikanan melakukan penyuluhan, untuk penilaian IKU ini akan dilakukan pada akhir tahun 2026.

Indikator Kinerja 6

Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan di BRPPUPP (Model), definisi dari IKU ini yaitu Jumlah kegiatan percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan melalui penerapan teknologi terekomendasi dan/atau teknologi tepat guna, termasuk penerapan metode dan praktik usaha yang telah terbukti keberhasilannya yang diharapkan dapat diadopsi dan diterapkan oleh pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan. Pelaksanaan kegiatan Percontohan Penyuluhan mengacu pada Petunjuk Teknis Percontohan Penyuluhan yang berlaku.

Tabel 14. Capaian IKU Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan di BRPPUPP (Model).

Realisasi TW I Tahun				Triwulan I Tahun 2026				RANCANGAN IK 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target TW I TA 2026	Realisasi TW I TA 2026	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-	-	5	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Pada Indikator Kinerja ini capaian kinerjanya berasal dari Laporan pelaksanaan kegiatan Percontohan Penyuluhan yang telah disusun oleh Satminkal. Untuk penilaian IKU ini akan dilakukan pada akhir tahun 2026.

Indikator Kinerja 7

Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPPUPP (Orang), definisi dari IKU ini yaitu Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Jumlah Penyuluh Perikanan dan/atau Asisten Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti dan lulus uji kompetensi, serta memperoleh sertifikat kelulusan dari Biro SDMAO KKP. Formula perhitungan IKU ini yaitu Hitung jumlah penyuluh

kelautan dan perikanan PNS yang lulus penilaian kompetensi yang dilakukan oleh Assesment Center KKP.

Tabel 15. Capaian IKU Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPPUPP (Orang).

Realisasi TW I Tahun				Triwulan I Tahun 2026				RANCANGAN IK 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target TW I TA 2026	Realisasi TW I TA 2026	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-	-	100	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Pada Indikator Kinerja ini capaian kinerjanya berasal dari Surat usulan pegawai yang mengikuti Uji Kompetensi dari Kepala UPT/Satminkal Penyuluhan KP kepada Pejabat Berwenang, dilampiri data Penyuluh Perikanan yang lulus Uji Kompetensi dilengkapi dengan link Sertifikat dan/atau Surat Keterangan dari Biro SDMAO KKP, sebagaimana format tabel. Untuk penilaian IKU ini akan dilakukan pada akhir tahun.

SASARAN KEGIATAN 2 :

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja 8

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUPP (%). Definisi IKU ini yaitu Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit kerja lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sampai dengan waktu pengukuran. Pada Indikator Kinerja ini capaian kinerjanya berasal dari Surat penyampaian hasil Rekomendasi Pengawasan dari Sekretariat BPPSDM KP Nomor: 1126/BPPSDM.1/HP.510/IV/2026 tanggal 14 April 2026.

Tabel 16. Capaian IKU Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPPUPP (%).

Realisasi Triwulan I Tahun				Triwulan I Tahun 2026				RANCANGAN IK 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target TW I TA 2026	Realisasi TW I TA 2026	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian
-	75	100	100	86	86	100	-34	89	96,62

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Triwulan I Tahun 2026 ini capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPPUPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) memiliki capaian sebesar 86% yang mana dengan angka tersebut menunjukkan bahwa realisasi capaian sama dengan target yang ditetapkan yaitu dengan target 86

dengan persentase sebesar 100%.

Selain itu, pada tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja ini mulai ada di TW I Tahun 2023. Capaian tahun 2023-2024 mengalami perubahan. Pada TW I tahun 2023 capaiannya adalah sebesar 75% (100,00%) dari target 75,00%), dan pada TW I tahun 2024 capaiannya adalah sebesar 100,00% (121,95% atau 120,00% pada aplikasi kinerjaku) dari target 82%, dan pada TW I tahun 2025 capaiannya adalah sebesar 100,00% (121,95% atau 120,00% pada aplikasi kinerjaku) dari target 85%. Pada tabel 23 diatas, dapat dilihat juga persentase capaian TW I tahun 2026 jika dibandingkan dengan target tahun 2029 pada Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025–2029 persentase capaiannya adalah sebesar 96,62%.

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPPUPP mencapai target pada TW I Tahun 2026 ini antara lain:

1. Rekomendasi yang diberikan oleh Tim Itjen KKP jelas sehingga dapat ditindaklanjuti
2. Komitmen dari pimpinan dalam menindaklanjuti rekomendasi dari tim Itjen KKP sebagai upaya untuk perbaikan kinerja organisasi;
3. Sistem pengawasan yang jelas dan transparan melalui aplikasi SIDAK, sehingga dapat memantau secara langsung terkait progres tindak lanjut dari rekomendasi;
4. Komunikasi lintas unit yang kuat untuk mempermudah penyelesaian temuan

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain :

1. Tindaklanjuti temuan Pusluh KP
2. Penyusunan dokumen tindak lanjut Penyelesaian Pengawasan Inspektorat Jenderal

Capaian Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPPUPP (%) satker lingkup Pusluh TW I Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17. Perbandingan Capaian Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan dengan Satminkal Lain.

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	86	86	100
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	86	86	100
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	86	86	100
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	86	100	116,28

Sumber: LKj UPT

Berdasarkan tabel diatas, dilihat bahwa persentase capaian terhadap target indikator kinerja

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPPUPP memiliki persentase capaian yang sama dengan Satker BRPBATPP Bogor dan BRPBAPPP Maros karena tidak dilakukan sampling oleh Itjen KKP.

Anggaran yang mendukung IKK ini sebesar Rp. 0,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0 (0%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 117,65% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 100%.

Indikator Kinerja 9

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di BRPPUPP (Nilai), Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Formula Perhitungan:

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.
- Nilai IKPA =

$$\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Tabel 18. Capaian IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai).

Realisasi Triwulan I Tahun				Triwulan I Tahun 2026				RANCANGAN IK 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target TW I TA 2026	Realisasi TW I TA 2026	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

Pada Indikator Kinerja ini capaian kinerjanya berasal dari Aplikasi OM SPAN dan/atau Surat/Nota Dinas Biro Keuangan. Untuk penilaian IKU ini akan dilakukan pada akhir tahun 2026.

Indikator Kinerja 10

Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP (Nilai)

Definisi IKU ini yaitu Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP.

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
A	>80 - 90	Memuaskan
BB	>70 - 80	Sangat Baik
B	>60 - 70	Baik
CC	>50 - 60	Cukup
C	>30 - 50	Kurang
D	0 - 30	Sangat Kurang

Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian dirilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.

Bukti data dukungnya berupa: (1) Surat resmi hasil penilaian AKIP Satker uji petik Itjen. (2) Hasil Penilaian Mandiri Satker dan hasil verifikasi Tim SAKIP BPPSDM.

Tabel 19. Capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP (Nilai).

Realisasi Triwulan I Tahun				Triwulan I Tahun 2026				RANCANGAN IK 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target TW I TA 2026	Realisasi TW I TA 2026	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-	-	81,6	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Pada Indikator Kinerja ini capaian kinerjanya berasal dari Surat Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri SAKIP dari Sekretariat BPPSDM KP. Untuk penilaian IKU ini akan dilakukan pada akhir tahun 2026.

Indikator Kinerja 11

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di BRPPUPP (Nilai) Definisi IKU ini adalah Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Formula Perhitungan NKA Satker adalah sebagai berikut:

Keterangan:

NKA Satker : Nilai Kinerja Satker

CRO : Capaian RO

PenggunaanSBK : Penggunaan SBK

NEAlokasi : Nilai Efisiensi Alokasi

WCRO : Bobot Capaian RO

$$NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times W_{Penggunaan_{SBK}}) + (NE_{Alokasi} \times W_{NE_{Alokasi}})$$

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektifitas Satker	45
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	25

Tabel 20. Capaian IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di BRPPUPP (Nilai).

Realisasi Triwulan I Tahun				Triwulan I Tahun 2026				RANCANGAN IK 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target TW I TA 2026	Realisasi TW I TA 2026	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-	-	72,5	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

Pada Indikator Kinerja ini capaian kinerjanya berasal dari Surat/Nota Dinas Biro Keuangan, Setjen KKP. Untuk penilaian IKU ini akan dilakukan pada akhir tahun 2026.

Indikator Kinerja 12

Indeks Profesionalitas ASN di BRPPUPP (indeks)

Definisi IKU ini antara lain: Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Formula Perhitungan:

- Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi (a) Kualifikasi, (b) Kompetensi; (c) Kinerja; dan (d) Disiplin.
- Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:

$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin	$IP_1 = W_{1j} \cdot R_{1j}$ $IP_2 = W_{2k} \cdot R_{2k}$ $IP_3 = W_{3l} \cdot R_{3l}$ $IP_4 = W_{4m} \cdot R_{4m}$	$W_{1j} \cdot R_{1j} = \text{Bobot Indikator Kualifikasi ke-j} \cdot \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j}$ $W_{2k} \cdot R_{2k} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-k} \cdot \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k}$ $W_{3l} \cdot R_{3l} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-l} \cdot \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l}$ $W_{4m} \cdot R_{4m} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-m} \cdot \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m}$
---	---	---

Tabel 21. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN di BRPPUPP (indeks).

Realisasi Triwulan I Tahun				Triwulan I Tahun 2026				RANCANGAN IK 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target TW I TA 2026	Realisasi TW I TA 2026	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-		83	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Pada Indikator Kinerja ini capaian kinerjanya berasal dari Nota Dinas Biro SDMAO. Untuk penilaian IKU ini akan dilakukan pada akhir tahun 2026.

Indikator Kinerja 13

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPPUPP (Nilai), Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai pengawasan kearsipan internal unit eselon I diperoleh dari nilai unit kearsipan II.

Formula perhitungannya adalah:

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:

1. pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)

- a. penciptaan arsip (25%),
- b. penggunaan arsip (25%),
- c. pemeliharaan arsip (25%)
- d. penyusutan arsip (25%)

2. sumber daya kearsipan (bobot 50%)

- a. sumber daya manusia kearsipan (50%),
- b. prasarana dan sarana (50%)

Tabel 22. Capaian IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPPUPP (Nilai).

Realisasi Triwulan I Tahun				Triwulan I Tahun 2026				RANCANGAN IK 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target TW I TA 2026	Realisasi TW I TA 2026	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-		83	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Pada Indikator Kinerja ini capaian kinerjanya berasal dari Surat/Nota Dinas Biro Umum, Setjen KKP. Untuk penilaian IKU ini akan dilakukan pada akhir tahun 2026.

Indikator Kinerja 14

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di BRPPUPP (%), Definisi IKU ini adalah Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Formula Perhitungannya yaitu:

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurangan terhadap angka capaian indikator ini.

Tabel 23. Capaian IKU Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%).

Realisasi Triwulan I Tahun				Triwulan I Tahun 2026				RANCANGAN IK 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target TW I TA 2026	Realisasi TW I TA 2026	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian
-	-	-	100	80	100	120	-	80	125

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Triwulan I Tahun 2026 ini capaian indikator kinerja Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%) memiliki persentase capaian sebesar 100 yang mana dengan angka tersebut menunjukkan bahwa realisasi capaian telah melebihi target yang ditetapkan yaitu dengan target 80. Untuk realisasi anggaran IKU ini sebesar Rp 6.338.673.761 (99,86%) dengan pagu Rp 6.346.976.000,-.

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%) mencapai target pada Triwulan I Tahun 2026 ini antara lain disebabkan oleh Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP BRPPUPP pada Triwulan I tahun 2026 nilainya sama besar Triwulan I Tahun 2025 dengan capaian sebesar 100.

Pada tabel 34. diatas, dapat dilihat juga persentase capaian Triwulan I tahun 2026 jika dibandingkan dengan target tahun 2029 pada Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025–2029 persentase capaiannya adalah sebesar 125%.

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP BRPPUPP pada Triwulan I tahun 2026 dapat melampaui target adalah Nilai Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diumumkan melalui aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan barang/jasa BRPPUPP Triwulan I tahun 2026 sehingga tidak ada selisih pagu.

Kegiatan yang dilakukan sebagai penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain adalah melakukan Sinkronisasi kegiatan dengan SIRUP.

Capaian Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%) satker lingkup Pusluh Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24. Perbandingan Capaian Persentase rencana umum pengadaan PBJ.

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	80	100	120
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	80	100	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	80	100	120
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	80	100	120

Sumber: LKj UPT

Berdasarkan tabel diatas, dilihat bahwa persentase capaian terhadap target indikator kinerja Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%) memiliki persentase capaian yang sama dengan BRPBATPP Bogor, Maros dan Gondol sehingga capaiannya adalah sebesar 120%.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah Operasional dan Pemeliharaan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 6.346.976.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 6.338.673.761 (99,86%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 20,14%.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pada Triwulan I Tahun 2026, DIPA BRPPUPP memiliki 2 (dua) program dengan pagu anggaran awal sebesar Rp. 86.738.262.000, yang terdiri dari Program Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan pagu awal Rp. 2.350.365.000 dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 84.387.897.000. Pada April 2025 terdapat revisi anggaran yang akhirnya untuk Program Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan mengalami penurunan menjadi Rp. 3.016.052.000 sehingga pagu revisi BRPPUPP sebesar Rp 75.257.376.000. Pada Agustus 2025 dilakukan revisi anggaran kembali yaitu penghapusan pagu blokir yang terdapat di BRPPUPP sehingga pagu BRPPUPP sampai dengan TW IV 2025 sebesar Rp 73.228.299.000. Pada Desember 2025 terdapat penambahan pagu untuk Belanja Pegawai dikarenakan adanya penambahan pegawai PPPK yang baru dilantik pada Oktober 2025 sehingga Pagu revisi BRPPUPP sebesar Rp 79.348.679.000,-.

Sampai dengan Tahun 2025 TA 2025, telah dilakukan revisi terhadap DIPA BRPPUPP sebanyak 15 kali, yaitu :

1. Revisi 1 : Revisi pemutakhiran KPA (penyesuaian anggaran outsourcing)
2. Revisi 2 : Revisi blokir anggaran (efisiensi) revisi DJA
3. Revisi 3 – 4 : Revisi DJA (pergeseran blokir)
4. Revisi 5 : Revisi DJA (Relaksasi Blokir)

Penyerapan anggaran BRPPUPP sampai dengan 31 Maret 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 25. Realisasi Anggaran BRPPUPP Triwulan I Tahun 2026.

NO.	BA-SATKER	NAMA SATKER	RPPN	KET.	JENIS BELANJA										TOTAL
					PEKERJA	BARANG	MODAL	DIKUR BUNDA	SUBSIDY	HISAB	SANJAY	LAIN LAIN	TRANSFER		
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
1	002-403823	BALAI RIET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	014	PAGU	70.065.504.000	9.283.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	79.348.679.000
				REALISASI	69.948.922.849	9.274.394.333	0	0	0	0	0	0	0	79.223.227.167	
				PERSENTASE	(99.83%)	(99.90%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(99.84%)	
				SISA	116.581.151	8.870.667	0	0	0	0	0	0	0	125.451.818	
			TOTAL	PAGU	70.065.504.000	9.283.175.000	0	0	0	0	0	0	0	79.348.679.000	
				REALISASI	69.948.922.849	9.274.394.333	0	0	0	0	0	0	0	79.223.227.167	
				PERSENTASE	(99.83%)	(99.90%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(99.84%)	
				SISA	116.581.151	8.870.667	0	0	0	0	0	0	0	125.451.818	

Sumber : data realisasi, aplikasi OMSPAN per tgl 31 Maret 2026

Tabel diatas merupakan data penyerapan anggaran BRPPUPP berdasarkan data pagu dan realisasi aplikasi OMSPAN sebesar Rp 79.348.679.000,-. Sehingga realisasi sebesar Rp. 79.229.871.535 (99,85%).

Dalam mencapai target Indikator Kinerja serta Sasaran Kegiatan di Triwulan I Tahun 2026, maka diperlukan alokasi anggaran untuk masing-masing Indikator Kinerja serta Sasaran Kegiatan. Berikut adalah tabel realisasi anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Sasaran Kegiatan BRPPUPP di Triwulan I Tahun 2026.

Tabel 26. Realisasi Anggaran dan Efisiensi Per IKU.

Indikator Kinerja Kegiatan		Kegiatan Pendukung (Renja/Rkakl 2025)	Kode	Anggaran/ Pagu (Rp)	Realisasi TAHUN 2025	%	Satuan Output	Target Output	Realisasi IKU TAHUN 2025	% Capaian NPSS	Efisiensi
S.1 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan				Rp. 2.912.400.000	Rp 2.912.118.800	99,99				112,24	12,25
1	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BRPPUPP (Kelompok)	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	'7020.QDD.646.	Rp 728.100.000	Rp. 728.029.700	99,99	Kelompok	3.430	3.711	108,19	8,2
2	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok)	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	'7020.QDD.646.	Rp 728.100.000	Rp. 728.029.700	99,99	Kelompok	149	160	107,38	7,39
3	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok)	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	'7020.QDD.646.	Rp 728.100.000	Rp. 728.029.700	99,99	Kelompok	442	465	105,20	5,21
4	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP BRPPUPP (Unit)	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	'7020.QDD.646.	Rp 728.100.000	Rp. 728.029.700	99,99	Unit	28	36	120	20,01
5	Nilai PNBK Satker BRPPUPP (Rupiah Milyar)	-		Rp -	Rp -	-	Rupiah Milyar	0,0399 (0,04 diaplikasi kinerjaku)	0,0413 (0,04 diaplikasi kinerjaku)	103,54	100

6	Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPPUPP (Paket)	-	-	Rp -	Rp -	-	Paket	1	2	120	100
7	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPPUPP (Orang)	-	-	Rp -	Rp -	-	Orang	2	3	120	100
8	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPPUPP (Orang)	-	-	Rp -	Rp -	-	Orang	19	23	120	100

S. 5 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan				Rp 76.436.279.000	Rp 76.317.752.735	89,84				114,05	14,21
Indikator Kinerja Kegiatan		Kegiatan Pendukung (Renja/Rkaki 2025)	Kode	Anggaran/Pagu (Rp)	Realisasi TAHUN 2025	%	Satuan Output	Target Output	Realisasi IKU TAHUN 2025	% Capaian NPSS	Efisiensi
11	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di Satker BRPPUPP (Dokumen)	-	-	Rp -	Rp -	-	Dokumen	1	2	120	100
12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUPP (%)	-	-	Rp -	Rp -	-	%	85	100	117,65	100
13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)	Pengelolaan Administrasi Keuangan Penyuluhan KP Layanan Tata Usaha dan Kerumahaan Pengurusan KP Layanan Perkantoran	'2378.EBD.955.201.DA 2378.EBA.962.201.DA 2378.EBA.994.	Rp 70.082.603.000	Rp 69.972.482.974	99,84	Nilai	92	99,72	108,39	8,55
14	Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP (Nilai)	.Penyusunan Program dan Anggaran Penyuluhan KP	'2378.EBD.952.201.DA	Rp 4.700.000	Rp 4.700.000	100	Nilai	80	84,4	105,50	5,5
15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)		-	Rp -	Rp -	-	Nilai	71,50	100	120	100
16	Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (Indeks)	Layanan Manajemen SDM. Pelayanan Kearsipan	'2378.EBC.954 2378.EBD.974	Rp 2.000.000	Rp 1.896.000	94,8	Indeks	81	83,35	102,90	8,1
17	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%)	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	'2378.EBA.994.002.	Rp 6.346.976.000	Rp 6.338.673.761	99,86	%	80	100	120	20,14
18	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPPUPP (%)	.Layanan BMN	'2378.EBA.956	Rp 5.000.000	Rp -		%	80	100	120	100
				Rp 79.348.679.000	Rp 79.229.871.535	99,85				113,15	13,3

Sumber : aplikasi kinerja dan OMSPAN Kementerian Keuangan

3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumberdaya BRPPUPP Triwulan I Tahun 2026

Efisiensi adalah cara untuk mencapai hasil maksimal dengan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya yang dimaksud adalah waktu, tenaga (sumberdaya manusia) dan biaya (anggaran). Suatu pekerjaan dinilai efisien apabila sumber daya (input) yang digunakan sedikit, namun mampu menghasilkan keluaran (output) sesuai dengan rencana atau harapan.

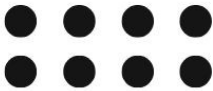
Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi, data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya.

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan bahwa skor kinerja BRPPUPP Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 111,67%, sedangkan realisasi anggaran telah mencapai 23,69%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja tersebut telah menghasilkan efisiensi sebesar 87,98% yang didapatkan dari selisih nilai pencapaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran yang telah diserap untuk mencapai kinerja.

Kondisi ini dipengaruhi beberapa hal antara lain:

1. Terdapat beberapa output dengan pencapaian sama dengan atau lebih besar dari 100%, seperti:
 - A. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok) dengan capaian di Triwulan I Tahun 2026 sebanyak 1 Kelompok dengan target sebanyak 1 Kelompok dengan persentase sebesar 100%
 - B. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPPUPP (Kelompok) tercapai sebanyak 120 kelompok dari target Triwulan I Tahun 2026 sebanyak 100 kelompok dengan persentase sebesar 120%.
 - C. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok) tercapai 7 kelompok dari target Triwulan I Tahun 2026 sebanyak 5 kelompok dengan persentase sebesar 120%.
 - D. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPPUPP (Unit) tercapai sebanyak 2 Unit dengan target 1 Unit dan persentase sebesar 120%

- E. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUPP (%) tercapai sebesar 86% dengan target sebesar 86% dengan persentase capaian 100%.**
- F. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di BRPPUPP (%) tercapai sebesar 100% dengan target yaitu sebesar 77% dengan persentase capaian 120%.**



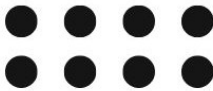
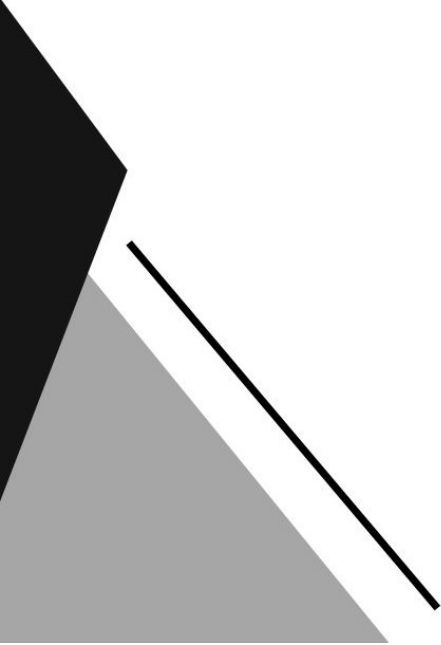
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BAB IV

PENUTUP

Capaian Kinerja Utama

Permasalahan dan Rekomendasi

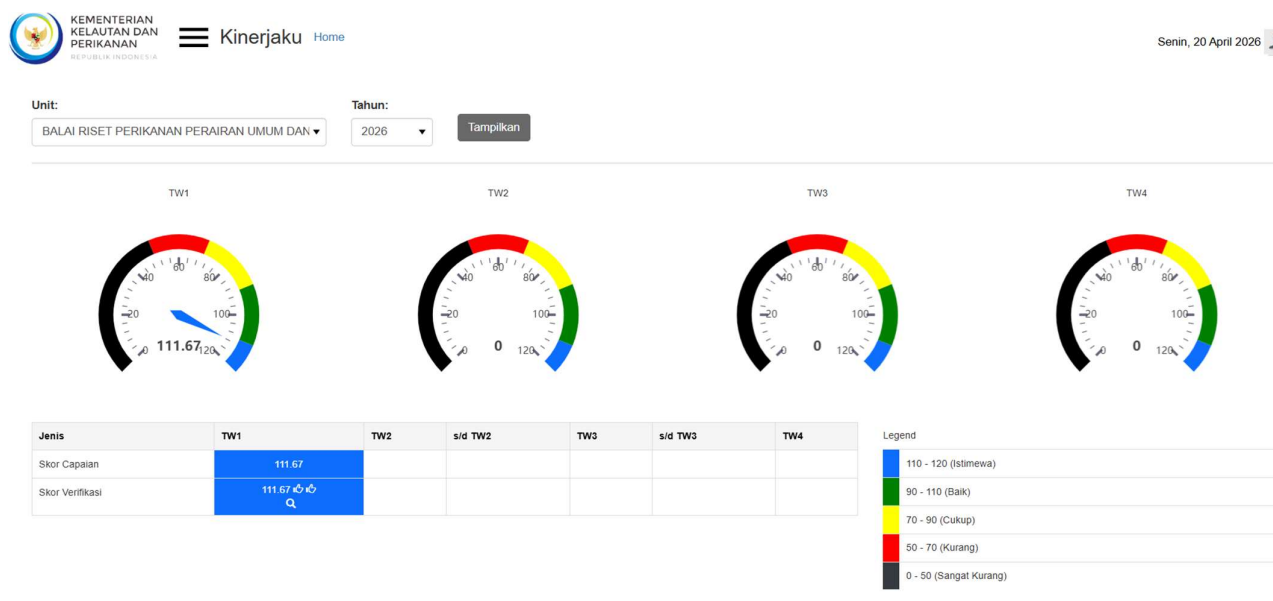


Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan
Penyuluhan Perikanan

BAB IV PENUTUP

4.1 Capaian Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja BRPPUPP Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan Aplikasi Kinerja dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BRPPUPP di tingkat korporat Triwulan I Tahun 2026 sebesar 111,67%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 4. Dashboard Kinerja Triwulan I Tahun 2026 BRPPUPP.

Pada Triwulan I Tahun 2026 dari 14 IKU terdapat 4 IKU BRPPUPP berstatus biru dan 2 IKU berwarna hijau, IKU yang telah ada capaiannya adalah:

- Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok) dengan capaian di Triwulan I Tahun 2026 sebanyak 1 Kelompok dengan target sebanyak 1 Kelompok dengan persentase sebesar 100%
- Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPPUPP (Kelompok) tercapai sebanyak 120 kelompok dari target Triwulan I Tahun 2026 sebanyak 100 kelompok dengan persentase sebesar 120%.
- Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok) tercapai 7 kelompok dari target Triwulan I Tahun 2026 sebanyak 5 kelompok dengan persentase sebesar 120%.

- D. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPPUPP (Unit) tercapai sebanyak 2 Unit dengan target 1 Unit dan persentase sebesar 120%**
- E. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUPP (%) tercapai sebesar 86% dengan target sebesar 86% dengan persentase capaian 100%.**
- F. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di BRPPUPP (%) tercapai sebesar 100% dengan target yaitu sebesar 77% dengan persentase capaian 120%.**

4.2 Permasalahan dan Rekomendasi

Permasalahan yang terjadi pada Triwulan I Tahun 2026 yaitu:

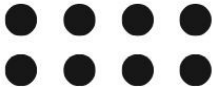
1. Masih ada piagam kelompok disuluh yang belum melakukan konversi nilai kelas kelompok.
2. Proses pencapaian IKU Kelompok yang ditingkatkan kelas cenderung membutuhkan waktu yang tidak singkat dan proses yang panjang karena melibatkan banyak pihak.

Secara umum Kinerja BRPPUPP pada Triwulan I Tahun 2026 berjalan dengan baik, namun demikian untuk memastikan capaian kinerja dapat tercapai dengan maksimal pada triwulan berikutnya perlu dilakukan beberapa rekomendasi antara lain:

1. Melakukan penyampaian kembali tentang konversi nilai kelas kelompok yang telah meningkat kepada penyuluh perikanan lingkup BRPPUPP melalui surat atau melalui kegiatan pendampingan oleh tim kerja penyuluhan perikanan baik secara luring maupun daring.
2. Menginventarisir calon kelompok yang akan ditingkatkan serta pengembangan Kompetensi dan Mindset Kelompok supaya lebih mandiri

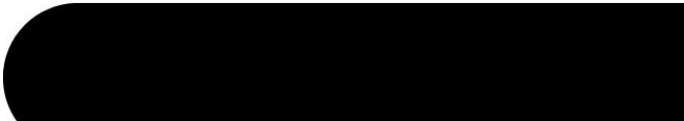
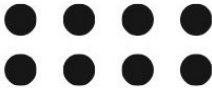
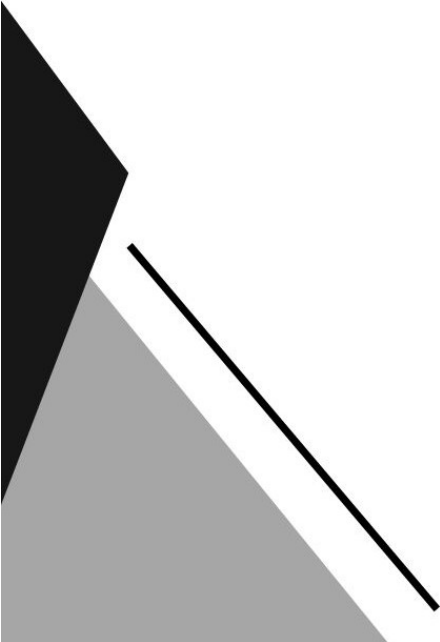
Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BRPPUPP. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BRPPUPP serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan dan membentuk pemerintahan yang baik (Good Governance) di lingkup BRPPUPP.

Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk melaksanakan amanah BRPPUPP ini, sehingga diharapkan capaian kinerja Balai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LAMPIRAN



Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan
Penyuluhan Perikanan



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL brsdrm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rezki Antoni S**

Jabatan : Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Yayan Hikmayani**

Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Riset Perikanan Perairan
Umum dan Penyuluhan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yayan Hikmayani



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rezki Antoni S

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1 Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok)	158
		2 Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPPUPP (Kelompok)	4.625
		3 Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok)	530
		4 Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPPUPP (Unit)	47
		5 Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BRPPUPP (Paket)	1
		6 Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan di BRPPUPP (Model)	1
		7 Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPPUPP (Orang)	10
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUPP (%)	86
		9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di BRPPUPP (Nilai)	92,1
		10 Penilaian Mandiri SAKIP di BRPPUPP (Nilai)	81
		11 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di BRPPUPP (Nilai)	71,75
		12 Indeks Profesionalitas ASN di BRPPUPP (Indeks)	82
		13 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPPUPP (Nilai)	71
		14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di BRPPUPP (%)	77

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	2.350.365.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDM KP	84.387.897.000
Total Anggaran Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan		86.738.262.000

Jakarta, 6 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yayan Hikmayani

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum
dan Penyuluhan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rezki Antoni S

Lampiran 4

SP tim Penyusun Pengelola Kinerja BRPPUPP Tahun 2026.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

JALAN GUBERNUR H. A. BASTARI NOMOR 08, JAKABARING-PALEMBANG
TELEPON: (0711) 5649600 FAKSIMILE (0711) 5469601
LAMAM: www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK persuratanbrppupp@kkp.go.id

**SURAT PERINTAH
KEPALA BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN
NOMOR : 1167/BRPPUPP/TU.110/I/2026**

TENTANG

**TIM PENGELOLAAN KINERJA
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN
PENYULUHAN PERIKANAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Institusi Pemerintah (SAKIP) di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, perlu dibentuk Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan tentang Tim Pengelolaan Kinerja di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.73/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1694);

MEMBERI PERINTAH

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN TENTANG TIM PENGELOLA KINERJA BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, yang terdiri dari Penanggung Jawab dan Pelaksana dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini;

KEDUA : Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

Tim Pengelola Kinerja BRPPUPP Tahun Anggaran 2026 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;
- b. Pelaksana
 1. Ketua:
Memimpin Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan dalam melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi di lingkungan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;
 2. Manajer Kinerja:
Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi kinerja di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan untuk memastikan pengelolaan kinerja berjalan sesuai ketentuan;
 3. Sub-Tim Perencanaan Kinerja, memastikan bahwa:
 - a. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah tersusun dan memuat:
 - 1) visi, misi, dan program;
 - 2) tujuan yang berorientasi hasil, indikator kinerja tujuan dan target;
 - 3) sasaran yang berorientasi hasil, indikator kinerja sasaran dan target tahunan; dan
 - 4) Indikator Kinerja Utama (IKU).
 - b. Indikator Kinerja:
 - 1) Digunakan sebagai ukuran kinerja formal;

- 2) Indikator kinerja eselon III telah selaras dengan IKU Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- 3) Indikator kinerja memenuhi kriteria SMART-C; dan
- 4) Ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.
- c. Dokumen Kontrak Kinerja:
 - 1) Perjanjian Kinerja (PK):
 - a) Tersusun selaras dengan dokumen Renstra dan PK atasannya;
 - b) memuat target kinerja, digunakan untuk mengukur keberhasilan; dan
 - c) dilengkapi dengan matrik cascading untuk pedoman penyusunan PK level dibawahnya.
 - 2) Peta Strategis;
 - 3) Rincian Target IKU secara bulanan/triwulan/semesteran/tahunan yang memuat metode perhitungan masing-masing IKU; dan
 - 4) Inisiatif Strategis/Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja.
- d. Rencana aksi atas kinerja telah tersusun dan dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan;
- e. Seluruh sasaran strategis, indikator kinerja, target dan rencana aksi diinput ke dalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja; dan
- f. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan kinerja secara berjenjang pada Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.
4. Sub-Tim Pengukuran Kinerja/Pelaporan Kinerja/Evaluasi Kinerja/Verifikasi:
 - a. Menyusun pedoman/mechanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja;
 - b. Melaksanakan pengukuran capaian IKU dan rencana aksi secara berjenjang dan berkala (bulanan/triwulan/semesteran/tahunan);
 - c. Memastikan seluruh hasil pengukuran capaian IKU dan rencana aksi diinput ke dalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja;
 - d. Mengkoordinasikan proses pengukuran kinerja secara berjenjang pada Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;
 - e. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) secara berkala (bulanan/triwulan/semesteran/ tahunan);

- f. Memastikan bahwa format dan substansi LKj telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - g. Memastikan LKj yang disusun telah dilengkapi dengan bukti/data pendukung yang cukup dan memenuhi unsur keterandalan;
 - h. Memastikan LKj yang telah disusun, disampaikan tepat waktu dan diunggah ke dalam laman resmi;
 - i. Mengkoordinasikan proses pelaporan kinerja secara berjenjang di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;
 - j. Melakukan evaluasi dan analisa atas hasil pengukuran dan pelaporan kinerja;
 - k. Menyusun laporan nilai evaluasi kinerja yang dilengkapi dengan rekomendasi dan alternatif perbaikan untuk perencanaan pengendalian dan peningkatan kinerja selanjutnya;
 - l. Melakukan evaluasi proses pengelolaan kinerja secara keseluruhan (SAKIP) di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - m. Menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan;
 - n. Mengkoordinasikan proses evaluasi kinerja secara berjenjang di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;
 - o. Melakukan verifikasi data, informasi dan dokumen hasil perencanaan kinerja;
 - p. Melakukan verifikasi data, informasi dan dokumen hasil pengukuran kinerja;
 - q. Melakukan verifikasi data, informasi dan dokumen hasil pelaporan kinerja;
 - r. Memastikan seluruh rekaman data, informasi dan dokumen hasil perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja serta dokumen lainnya yang diperlukan terdokumentasi dengan baik; dan
 - s. Mengkoordinasikan proses verifikasi kinerja secara berjenjang di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.
5. Sub-Tim Kinerja Pegawai:
- a. Menyelaraskan indikator kinerja pegawai dengan indikator kinerja organisasi;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai yang telah menggambarkan hubungan antara kinerja organisasi dengan sasaran kinerja pegawai;

- c. Memastikan adanya integrasi sistem pengelolaan kinerja pegawai dengan sistem pengelolaan kinerja organisasi;
- d. Memastikan penerapan penghargaan dan sanksi (reward and punishment) berbasis kinerja pada setiap pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
- e. Mengkoordinasikan proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja pegawai secara berjenjang dan berkala di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.

- KETIGA : Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan narasumber/pakar/praktisi/tenaga ahli/konsultan untuk memperkaya informasi dan teknologi aplikasi sesuai dengan kebutuhan;
- KEEMPAT : Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, serta Pusat Penyuluhan KP;
- KELIMA : Masa kerja Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak berlakunya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2026;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul Keputusan ini dibebankan pada anggaran Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
 Pada Tanggal, 9 Januari 2026
 Kepala Balai Riset Perikanan
 Perairan Umum dan Penyuluhan
 Perikanan



Antoni

Rezki Antoni S, S.Kel
 NIP. 19850619 201012 1 001

Lampiran : Surat Perintah Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum
dan Penyuluhan Perikanan
Nomor : 1167/BRPPUPP/TU.110/I/2026
Tanggal : 9 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLAAN KINERJA
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

Pengarah : Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan
Perikanan

Penanggung Jawab :

No.	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
Manajer Teknis		
1.	Rezki Antoni S	Manajer
2.	Rully Ismanto	Manajer
3.	Sri Mulyani	Manajer
Sub Tim Perencanaan Kinerja		
1.	Acim Tirtana	Perencana
2.	Lisnawati	Perencana
3	Rian Ariadi Harahap	Perencana
Sub Tim Pengukuran Kinerja/Pelaporan Kinerja/Evaluasi Kinerja/Verifikasi		
1.	Sevi Sawestri	Pelaksana
2.	Arismansyah	Pelaksana

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal, 9 Januari 2026
Kepala Balai Riset Perikanan
Perairan Umum dan Penyuluhan
Perikanan



Rezki Antoni S. S, Kel
NIP. 19850619 201012 1 001



Terima Kasih

BRPPUPP Palembang



(0711) 5649600



www.kkp.go.id/brsdm/brppupppalembang



persuratanbrppupp@gmail.com



[bppsdm_brppupp.palembang](https://www.instagram.com/bppsdm_brppupp.palembang)